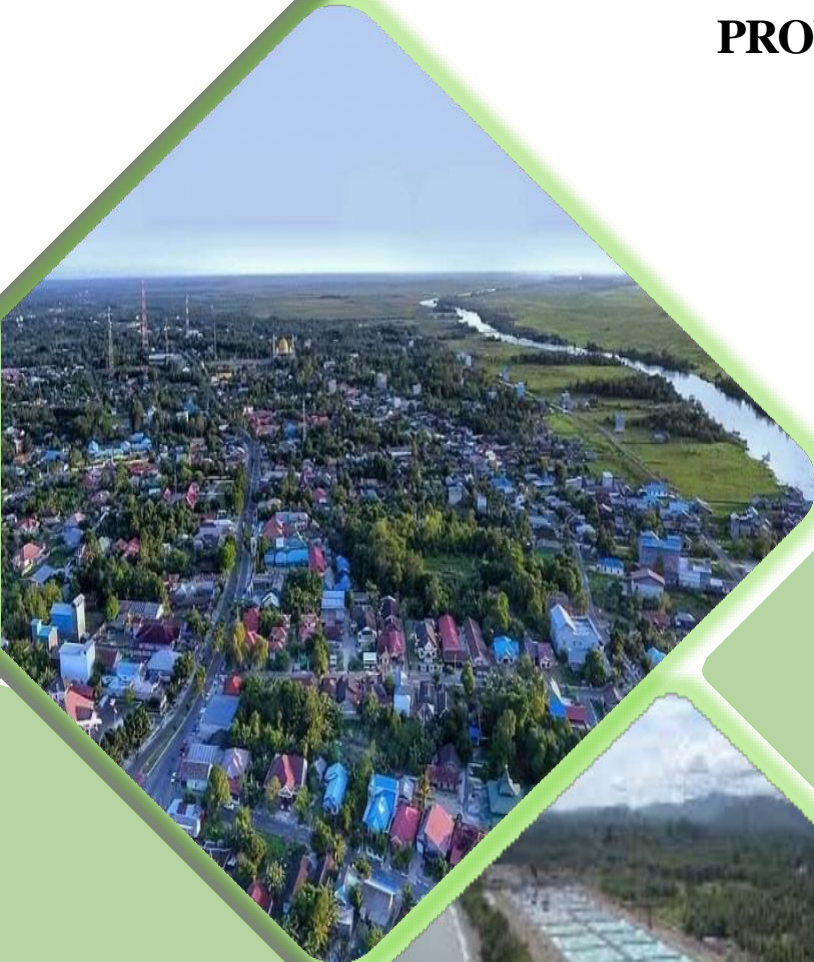




**KABUPATEN SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**P.J. BUPATI SUKAMARA**  
Dr. H. KASPINOR, SE., M.Si



**LKIP 2023**  
**Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah**



## **PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Tjilik Riwut Km. 7 ☎ (0532) 26102 Sukamara 74714

---

### **PERNYATAAN TELAH DI REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran 050/209/IJ tanggal 20 Januari 2022 tentang Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang di muat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Sukamara yang menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Sukamara telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Sukamara.

**Inspektur Daerah Kabupaten Sukamara**



**ELVRINA SEPTIAWATY,S.STP.,CGCAE**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19810924 199912 2 002**

## KATA PENGANTAR

**P**uji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Sukamara Tahun 2023 dapat kami selesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama Tahun 2023 atau Tahun Kelima pelaksanaan RPJMD 2018-2023. Sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Sukamara yaitu : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKAMARA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”, sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sukamara tidak terlepas peran serta semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kabupaten Sukamara Tahun 2023.

Sukamara, Maret 2024

**Pj. Bupati Sukamara,**



**DR. H. KASPINOR,SE., M.Si**



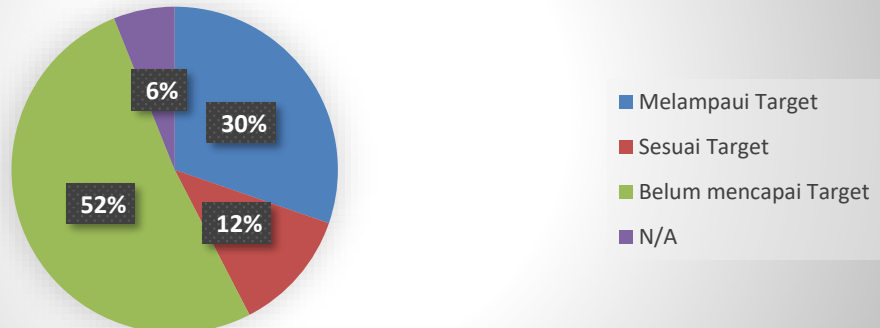
# IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Sukamara terus berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas

kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. LKIP tidak hanya sekadar alat akuntabilitas, akan tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan.



**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2023**



**Sumber:** Bagian Organisasi Setda Kab. Sukamara, 2024

Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tahun 2023 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 tahun Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 ditetapkan 8 sasaran dengan 33 Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan dalam Perjanjian

Kinerja, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. 10 Indikator atau 30 % Melampaui target
2. 4 Indikator atau 12 % Sesuai target
3. 17 Indikator atau 52 % Belum mencapai target
4. 2 Indikator atau 6 % N/A (Belum Tersedia Data)

Dalam Tahun Anggaran 2023, untuk pencapaian kinerja 8 indikator sasaran strategis dan 33 indikator sasaran pada RPJMD Kabupaten Sukamara termasuk 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sukamara yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kantor serta Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, anggaran Belanja Daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 805.778.195.369,00** dengan realisasi anggaran mencapai **Rp 732.441.791.657,18** atau **90.90 %** (data sebelum dilakukan audit oleh BPK).

**Tabel i.I**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Urutan	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
I	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
II	76 % ≤ 90 %	Tinggi
III	66% ≤ 75%	Sedang
IV	51% ≤ 65%	Rendah
V	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Lampiran VII.C Permendagri No 54 tahun 2010

Dengan mengacu kepada skala tersebut, dapat diikhtisarkan bahwa dari 1 Visi, 5 Misi, 6 Tujuan, 8 sasaran dan 33 Indikator Sasaran telah terealisasi dengan gambaran sebagai berikut :

**TABEL i.II**  
**Realisasi Capaian Sasaran**

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Jumlah Sasaran
I	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	20
II	76 % ≤ 90 %	Tinggi	2
III	66% ≤ 75%	Sedang	2
IV	51% ≤ 65%	Rendah	2
V	≤ 50%	Sangat Rendah	7
<b>JUMLAH</b>			<b>33</b>

Secara rinci Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara pada Tahun 2023, yakni :

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
<b>MISI I : Membangun Manajemen Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, dan Demokratis Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat</b>			
<b>TUJUAN I : Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik</b>			
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pelayanan publik	88.43 %	3 indikator sasaran yaitu Opini BPK, LKJiP dan LPPD realisasi tahun 2022
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI I</b>		<b>88.43 %</b>	
<b>MISI II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang Terdidik Dan Sehat</b>			
<b>TUJUAN II : Mewujudkan Masyarakat Sukamara yang berdaya saing</b>			
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan	99.18 %	
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI II</b>		<b>99.18%</b>	
<b>MISI III : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur, dan Berkeadilan</b>			
<b>TUJUAN III : Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat</b>			
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	53,07 %	
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	140 %	Target Rasio Rumah Layak Huni 30 Unit Realisasi 42 Unit
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI III</b>		<b>96, 53 %</b>	
<b>MISI IV : Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata) dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup</b>			
<b>TUJUAN IV : Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing</b>			
1	Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	79,59 %	
2	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian, Perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	101,94 %	
<b>TUJUAN V : Meningkatkan kualitas pendayagunaan dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan</b>			
1	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	73,93 %	
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI 4</b>		<b>85,15 %</b>	
<b>MISI V : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan Dinamis.</b>			
<b>TUJUAN VI : Mewujudkan masyarakat Sukamara yang aman, tertib dan dinamis</b>			
1	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	68,12 %	
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI V</b>		<b>68,12 %</b>	
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI</b>		<b>87,48 %</b>	

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 8 sasaran yang mencakup 33 indikator sasaran. Diketahui rata-rata capaian misi I **88,43 %** atau **Tinggi**, rata-rata misi II **99,18 %** atau **Sangat Tinggi**, rata-rata misi III **96,53 %** atau **Sangat Tinggi**, rata-rata misi IV **85,15 %** atau **Tinggi**, dan rata-rata misi V **68,12 %** atau **Sedang**. Rata-rata capaian kinerja seluruh misi yakni **87,48 %** atau **Tinggi**.

Kedepan, upaya perbaikan pelaksanaan kerja untuk mencapai kinerja yang baik, tetap dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sukamara. Hal tersebut tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang.

Sukamara, Maret 2024

**Pj. BUPATI SUKAMARA**



**DR. H. KASPINOR, SE., M.SI**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>I</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI VI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 Dasar Hukum	2
1.2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA	2
1.2.1 Letak Wilayah Geografis	2
1.2.2 Karakteristik dan Luas Wilayah	3
1.2.3 Perekonomian Kabupaten Sukamara	3
1.3 PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SUKAMARA	8
1.4 KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI	9
1.3.1 Kedudukan	9
1.3.2 Kewenangan dan Tugas Pokok	9
1.3.3 Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara	12
1.3.4 Aparatur Pemerintah	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>16</b>
2.1 RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2019 - 2023	16
2.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023	17
2.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022	20
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA	23
2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	28
2.5 RENCANA ANGGARAN 2022	32
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>34</b>
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	34
3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS	36
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	40
ANALISIS PENCAPAIAN PER SASARAN STRATEGI	45
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>65</b>
4.1 KESIMPULAN	65
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	65



<b>Lampiran 1: Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukamara 2018 - 2023</b>	<b>67</b>
<b>Lampiran 2 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT)</b>	<b>69</b>
<b>Lampiran 3 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022</b>	<b>72</b>
<b>Lampiran 4 : Pengukuran Kinerja</b>	<b>87</b>
<b>Lampiran 5 : Capaian Kinerja 2018 - 2023</b>	<b>91</b>
<b>Lampiran 6 : Rencana Aksi Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara</b>	<b>96</b>
<b>Lampiran 7 : SOP MEKANISME PENGUMPULAN KINERJA</b>	<b>98</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban. Peruntukannya, yakni mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas ditetapkan melalui media pertanggungjawaban. Pelaksanaannya sendiri, dilangsungkan secara periodik.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Bupati menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bertitik tolak dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2023, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta hasil Reviu sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Sukamara, maka penyusunan LKIP Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKIP Kabupaten Sukamara Tahun 2023 menjadi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu Bupati kepada Presiden melalui Kementerian PAN-RB yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil program/kegiatan

Tahun 2023 yaitu tahun Terakhir RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023.

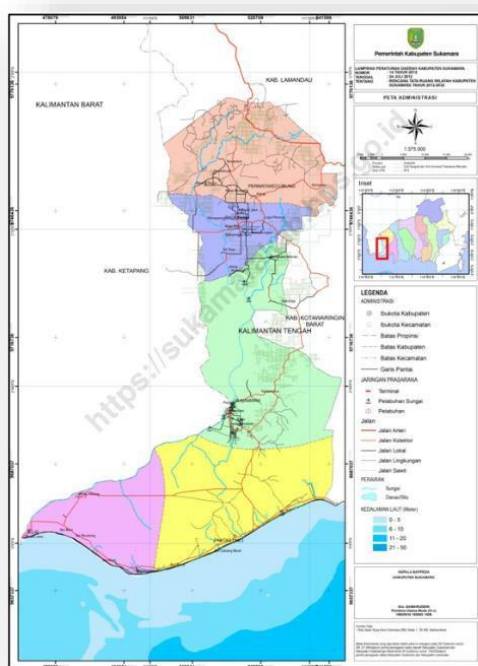
### 1.1.1 Dasar Hukum

Sebagaimana telah kita ketahui, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Artinya, menyusun laporan tersebut secara “Benar” dan “Tepat” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tanggungjawab setiap instansi pemerintah. Hal ini merujuk pada aturan-aturan yang ada sebagai dasar atau pijakan hukum antara lain, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Peberantasan Korupsi.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiv atas laporan kinerja instansi pemerintah.

## 1.2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

### 1.2.1 Letak Wilayah Geografis



Secara geografis, Kabupaten Sukamara terletak pada  $2^{\circ}19'$  sampai dengan  $3^{\circ}07'$  Lintang Selatan (LS) dan  $110^{\circ}25'$  sampai dengan  $111^{\circ}9'$  Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kabupaten Sukamara adalah 3.827 Km<sup>2</sup> atau 382.700 Ha atau 2,49% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari hutan, rawa, sungai, danau, genangan air, pantai dan tanah lainnya. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;  
 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat;  
 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa; dan  
 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat



Dengan kondisi geografis yang dilintasi sungai dan berbatasan dengan laut Jawa menjadikan komoditas perikanan tidak begitu sulit ditemui di Kabupaten Sukamara.

### 1.2.2 Karakteristik dan Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sukamara mengacu kepada Undang undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah dan Permendagri RI No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kabupaten Sukamara berasal dari sebagian wilayah Kotawaringin Barat yang terdiri atas Kecamatan Balai Riam, Kecamatan Sukamara dan Kecamatan Jelai. Kemudian, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 03 Tahun 2006, dibentuk kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci.

Karakteristik wilayah di Kabupaten Sukamara bagian Barat dan Utara memiliki ketinggian 7 – 100 m di atas permukaan laut, sedangkan wilayah selatan merupakan wilayah dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut Jawa.

### 1.2.3 Perekonomian Kabupaten Sukamara

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan per kapita dan laju inflasi. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 4,14 persen, sedangkan kabupaten Sukamara mengalami pertumbuhan sebesar 5,64 persen.

#### A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukamara 2023 masih menggunakan angka tahun 2010 sebagai tahun dasar.

Pada tahun 2023, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sukamara yaitu 5.922,1 miliar rupiah. Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Sukamara, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,80 persen, diikuti oleh sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sukamara Tahun 2016-2020 sebagai alat untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat dilihat pada gambar berikut.

***Tabel 1.1***  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukamara (miliar rupiah), 2019 – 2023**

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	933,4	958,8	1 023,4	1 087,1	1.150,9
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	26,0	25,0	25,5	26,3	27,9
<b>C</b>	Industri Pengolahan	681,8	704,1	733,6	776,4	820,0
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	1,0	1,1	1,2	1,2	1,4
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>F</b>	Konstruksi	261,9	248,9	254,3	270,5	288,3
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	350,7	358,2	376,1	397,3	421,7
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	66,3	68,5	71,1	73,5	77,7
<b>I</b>	Penyediaan, Akomodasi dan Makan Minum	30,7	29,9	31,1	32,7	35,0
<b>J</b>	Informasi dan	38,9	41,2	43,3	44,8	45,8



Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
	Komunikasi					
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	51,3	53,5	56,7	57,9	61,0
<b>L</b>	Real Estat	38,1	38,3	39,7	40,9	42,3
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	178,8	180,8	180,8	191,0	201,3
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	120,9	126,4	132,2	137,6	142,7
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	49,2	50,4	53,2	55,3	57,5
<b>R,S,T,U</b>	Jasa Lainnya	18,6	19,0	19,4	20,0	20,6
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>2 849,0</b>	<b>2 905,5</b>	<b>3 043,1</b>	<b>3 214,2</b>	<b>3.395,6</b>

**Tabel 2.2**  
**Disribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukamara (persen), 2019 – 2023**

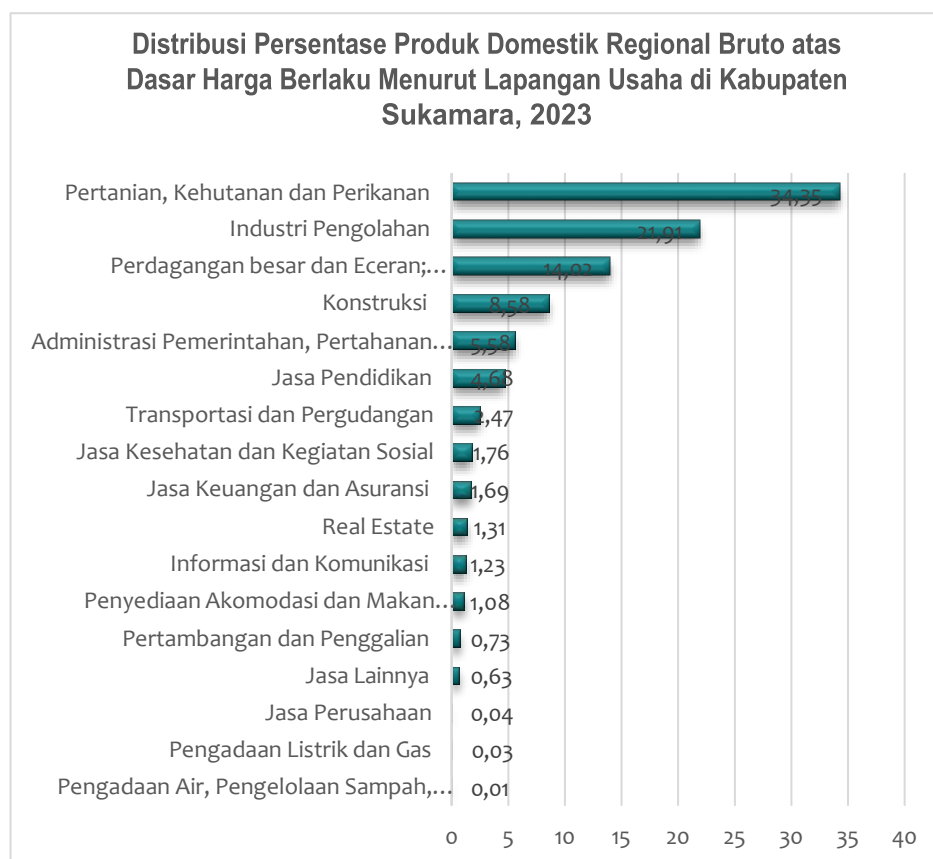
Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	30,41	31,98	33,88	34,25	34,80
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	0,90	0,83	0,77	0,73	0,74
<b>C</b>	Industri Pengolahan	21,79	21,81	21,89	21,91	21,71
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>F</b>	Konstruksi	9,65	8,70	8,56	8,58	8,49
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,59	14,19	14,02	14,02	14,02
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	2,70	2,67	2,53	2,47	2,52
<b>I</b>	Penyediaan, Akomodasi dan Makan Minum	1,24	1,17	1,09	1,08	1,10
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	1,26	1,29	1,25	1,23	1,18
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,82	1,84	1,75	1,69	1,66
<b>L</b>	Real Estat	1,51	1,47	1,36	1,31	1,32

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,50	6,43	5,65	5,58	5,43
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	4,95	4,96	4,73	4,68	4,61
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,90	1,89	1,80	1,76	1,73
<b>R,S,T,U</b>	Jasa Lainnya	0,70	0,69	0,65	0,63	0,61
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>

Sementara angka PDRB Kabupaten Sukamara atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, selama kurun waktu 5 (empat) tahun terakhir adalah masing-masing 2.849,2 miliar rupiah (2019), 2.905,5 miliar rupiah (2020), 3.043,1 miliar rupiah (2021), 3.214,2 miliar rupiah (2022), dan 3.395,6 miliar (2023)

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2023, PDRB per kapita secara riil Kabupaten Sukamara mencapai 81,7 juta rupiah. Angka ini diperoleh menggunakan data Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni). Kontribusi masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sukamara Tahun 2023 ditunjukkan dalam grafik berikut.

*Grafik 1. 1*



## B. Struktur Perekonomian Daerah

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya

## C. PDRB Perkapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya nilai Indikator lain untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk

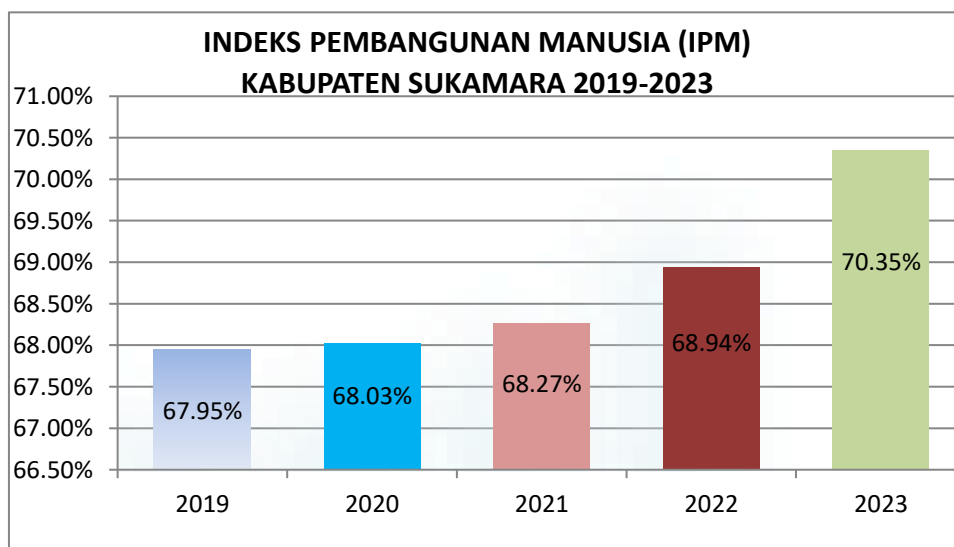
akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2023, PDRB per kapita secara riil Kabupaten Sukamara mencapai 86,09 juta rupiah. Angka ini diperoleh menggunakan data proyeksi penduduk Interm 2020-2023 (pertengahan tahun/juni).

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. Sementara angka PDRB Kabupaten Sukamara atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah masing– masing 2.849,2 miliar rupiah (2019), 2.905,5 miliar rupiah (2020), 3.043,1 miliar rupiah (2021), 3.214,2 miliar rupiah (2022), dan 3.395,6 miliar rupiah (2023).

### 1.3 PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SUKAMARA

Kualitas Pembangunan sebuah wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukamara Tahun 2023 sebesar 70,35 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (68,94). Kabupaten Sukamara berada pada posisi kedua IPM terendah di Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut adalah grafis Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukamara Tahun 2018 – 2023:



## 1.4 KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

### 1.3.1 Kedudukan

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sukamara dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

#### a. Aspek Politik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Sukamara dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.

#### b. Aspek Administrasi/Manajemen Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

### 1.3.2 Kewenangan dan Tugas Pokok

#### a. Kewenangan

Kabupaten Sukamara sebagai daerah otonomi, kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Pemerintah Kabupaten Sukamara menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) urusan wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar pemerintahan dan 8 (delapan) urusan pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan.

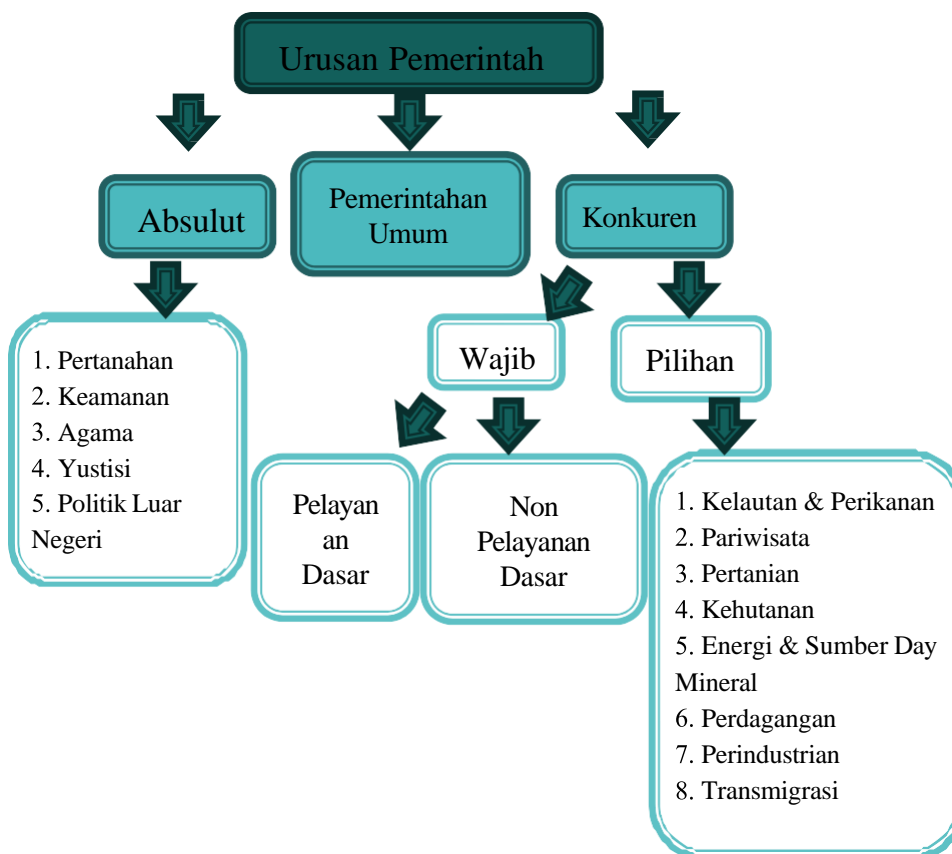
Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren



adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

**Gambar 1. 1**

**GAMBARAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN**



Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

### Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

**Gambar 1.2**  
**PEMBAGIAN URUSAN WAJIB**



Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

#### b. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Sukamara mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKAMARA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”**

### 1.3.3 Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara

Sukamara sebagai salah satu daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara bahwa tipe – tipe Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Sukamara yakni :

1. Sekretariat Daerah merupakan tipe C yang melaksanakan fungsi staf;
2. Sekretariat DPRD tipe C yang melaksanakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
3. Inspektorat Daerah tipe C merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanian;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sub urusan kebakaran;

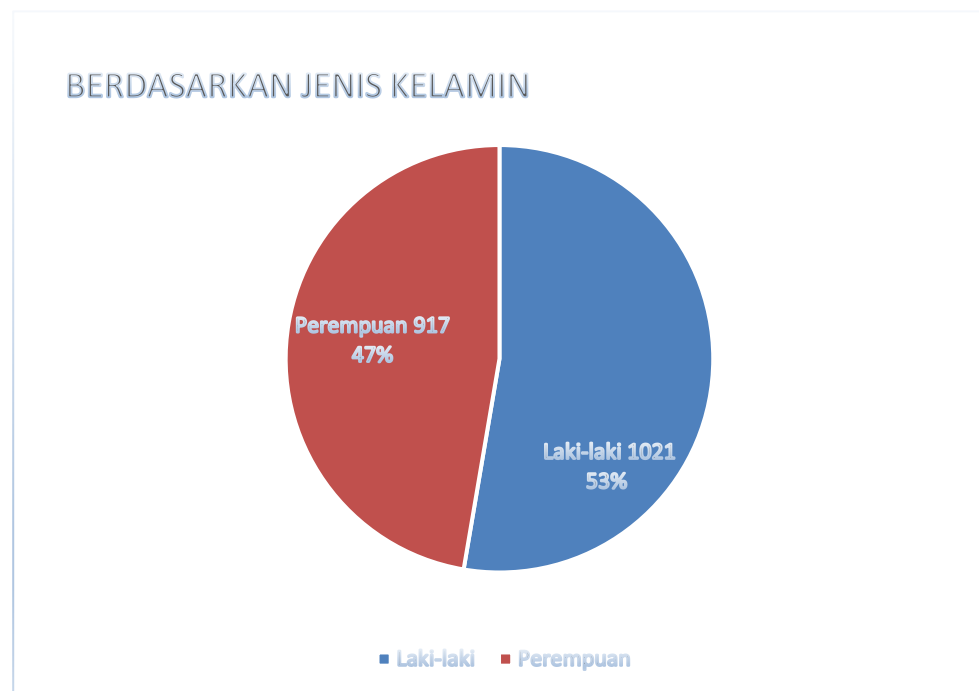
8. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
12. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
14. Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan serta perindustrian;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
19. Dinas Perikanan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang, penelitian dan pengembangan;
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe B menyelenggarakan sub urusan penanggulangan bencana;

25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
26. Kecamatan Sukamara tipe A;
27. Kecamatan Balai Riam tipe A;
28. Kecamatan Pemata Kecubung tipe A;
29. Kecamatan Pantai Lunci tipe B; dan
30. Kecamatan Jelai tipe B

### 1.3.4 Aparatur Pemerintah

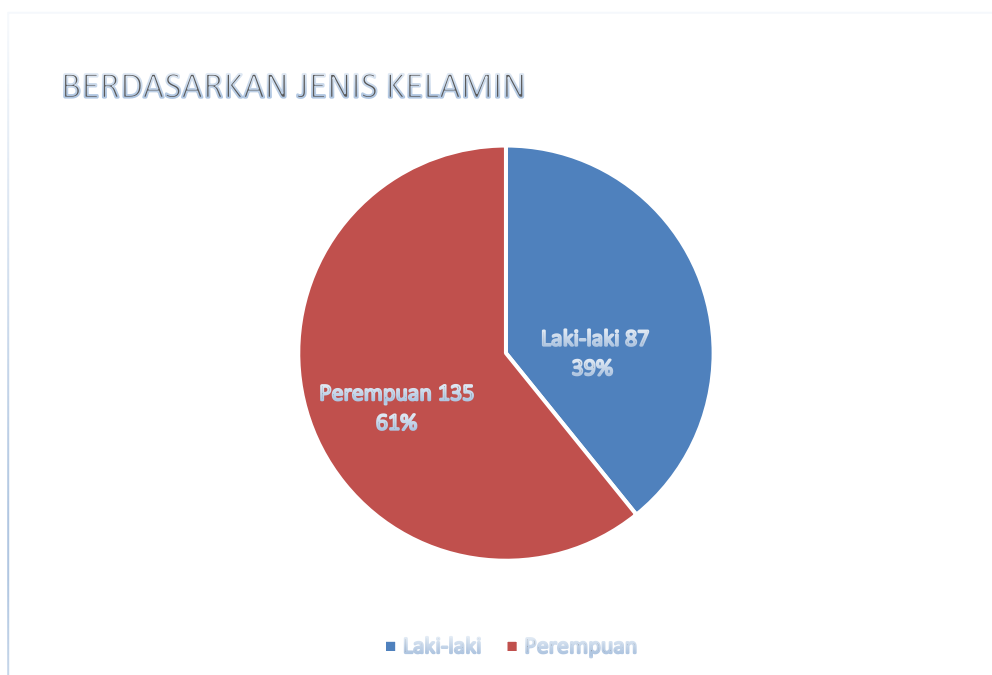
Keadaan Aparatur Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada Tahun 2023 sejumlah **2160** orang, yang terdiri dari : 1938 orang Pegawai Negeri Sipil dan 222 orang PPPK

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut:





Jumlah PPPK menurut:



Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 sebanyak **2.160 Orang** terdiri dari **1.021 Laki-Laki (53%)** dan **917 (47%) Perempuan (PNS)** dan **87 ( 39%) Laki-Laki 135 (61%) Perempuan (PPPK)** .

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2019 - 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2018 – 2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 tahun Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD periode 2018 – 2023. Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKAMARA YANG  
SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG  
PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”**

Penjabaran lebih lanjut mengenai Visi di atas adalah sebagai berikut :

- SUKAMARA** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kabupaten Sukamara dengan 5 (lima) kecamatan dan 32 desa/Kelurahan.
- SEJAHTERA** : Mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk, yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- MAJU** : Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung Sumber Daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.
- BERMARTABAT** : Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai – nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral maupun norma agama masyarakat.
- PROFESIONAL** : Mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntabel,

Transparan dan Efisien) dan bersih (Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam upaya pencapaian melalui **5 (Lima) Misi sebagai berikut:**

- 1). Membangun manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan demokratis yang berbasis pelayanan prima kepada masyarakat.
- 2). Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara yang Terdidik dan Sehat.
- 3). Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan.
- 4). Mendorong Kemandirian Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup.
- 5). Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat menuju kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.



## 2.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam dokumen perencanaan perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran,

program dan kegiatan menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama dengan lebih menekankan pada target kinerja. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran renstra perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Hubungan antara kepala daerah dan perangkat daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran.

**Tujuan** adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pada Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 ini disertakan indikator untuk setiap tujuan sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan.

**Sasaran** adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut dilakukan reviu atas tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 menetapkan sebanyak 20 (dua puluh) sasaran dan 38 (tiga puluh delapan) indikator sasaran sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sukamara 2018 – 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
Misi 1: Membangun Manajemen Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, dan Demokratis Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat			
1	Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintah yang baik	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pelayanan publik	Opini BPK
			Nilai LkjIP
			Indeks Kepuasan Masyarakat
			Tingkat Maturiti SPIP
			Nilai EKPPD
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Masyarakat yang Terdidik dan Sehat			
2	Mewujudkan masyarakat sukamara yang berdaya saing	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Harapan Lama Sekolah
			Rata-rata Lama Sekolah
			Angka Harapan Hidup
			Presentase Balita Gizi Buruk
			Konsumsi per kapita

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
<b>Misi 3 : Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur Dan Keadilan</b>			
3	Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)
			Persentase penduduk berakses air minum
			Rasio jaringan irigasi
			Cakupan layanan Telekomunikasi
			Persentase rumah tinggal Bersanitasi
			Persentase rumah tangga pengguna listrik
		Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan Kumuh	Rasio rumah layak huni (jumlah rumah)
<b>Misi 4 : Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri, Dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup</b>			
4	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing	Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka
			Tingkat partisipasi kerja
			Angka kemiskinan
			Tingkat inflasi
			PDRB Per Kapita ADHB
		Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB)
			Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB)
			Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB
			Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB)
			Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
			Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)
5	Meningkatnya kualitas pendayagunaan dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam yang	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Hasil pengukuran indeks kualitas air
			Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
	berkelanjutan dan ramah lingkungan		
<b>Misi 5: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram Dan Dinamis</b>			
<b>6</b>	Mewujudkan masyarakat Sukamara yang aman, tertib dan dinamis	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Persentase laporan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang Ditindaklanjuti
			Persentase laporan pelanggaran perda yang Ditindaklanjuti
			Indeks Pembangunan Gender

## 2.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program yang menjadi kewenangan daerah. Adapun Strategi dan Arah kebijakan Kabupaten Sukamara tahun 2018-2023 yaitu :

**Tabel 2.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023**

No	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN	1.1	Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN dalam bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan, dan kualitas pelayanan publik dengan gerakan “melayani dengan ikhlas” serta mengembangkan mekanisme komplain melalui PPID (Pusat Pengaduan dan Informasi Daerah)
2	Melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan menerapkan Sistem Informasi pada Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Prosedur Pengawasan	2.1	Pengembangan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan prosedur pengawasan yang terintegrasi
3	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat	3.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan

No	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		3.2	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan secara bertahap
		3.3	Perluasan cakupan pemberian beasiswa
4	Meningkatkan budaya baca bagi masyarakat	4.1	Peningkatan cakupan pelayanan perpustakaan dan menggalakkan gerakan jam belajar masyarakat
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	5.1	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam Pola Hidup Bersih Sehat
		5.2	Peningkatan cakupan pelayanan jaminan Kesehatan
		5.3	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga Kesehatan
		5.4	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan secara bertahap untuk memenuhi standar
6	Mengendalikan pertumbuhan Penduduk	6.1	Pengendalian angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)
		6.2	Peningkatan peserta KB aktif dan KB Mandiri
7	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	7.1	Peningkatan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dan peningkatan kesehatan perempuan dan anak-anak
		7.2	Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak dan Kecamatan Layak Anak
8	Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni	8.1	Peningkatan jangkauan program penanganan RTLH
9	Mengurangi kawasan permukiman kumuh	9.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh
10	Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi layak bagi masyarakat	10.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sanitasi layak
11	Meningkatkan cakupan pelayanan air minum bersih layak bagi masyarakat	11.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana air minum/bersih layak
12	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	12.1	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan Jembatan
13	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	13.1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
14	Meningkatkan kualitas SDM Tenaga Kerja	14.1	Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja
		14.2	Pengembangan balai tenaga kerja
		14.3	Perluasan jejaring penempatan tenaga kerja
15	Meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM	15.1	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM
16	Meningkatkan kinerja perindustrian, perdagangan, dan investasi	16.1	Pengembangan sentra IKM
		16.2	Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku dan teknologi produksi

No	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		16.3	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan
		16.4	Peningkatan nilai ekspor
		16.5	Peningkatan sarana prasarana perdagangan
		16.6	Peningkatan partisipasi dalam berbagai event promosi investasi
17	Meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan	17.1	Peningkatan mutu dan pemasaran produk/komoditas pertanian dalam arti luas
		17.2	Pengembangan usaha pertanian yang Berkelanjutan
		17.4	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi Petani
18	Meningkatkan produktivitas perikanan secara berkelanjutan	18.1	Peningkatan kapasitas SDM pelaku perikanan
		18.2	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan
		18.3	Perluasan akses permodalan di bidang perikanan
		18.4	Pengembangan pemanfaatan teknologi perikanan yang ramah lingkungan
19	Meningkatkan kualitas destinasi dan investasi Pariwisata	19.1	Pengembangan destinasi wisata unggulan yang Berkelanjutan
		19.2	Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan
20	Meningkatkan even/gelaran seni/budaya	20.1	Peningkatan even/gelaran seni/budaya berskala nasional maupun regional
21	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari	21.1	Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		21.2	Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
		21.3	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana persampahan
		21.4	Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau publik
		21.5	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
22	Meningkatkan komunikasi diantara seluruh stakeholder, mempercepat penyelesaian permasalahan dalam koridor kebijakan lokal dan hukum secara komprehensif	22.1	Menciptakan situasi yang kondusif diantara para penegak hukum dan masyarakat, salah satunya melalui pemberian pelayanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang dilakukan melalui kerjasama pemerintah daerah dengan instansi/lembaga yang bergerak di bidang hukum
23	Meningkatkan komunikasi diantara seluruh stakeholder, mempercepat penyelesaian	23.1	Menciptakan situasi yang kondusif diantara para penegak hukum dan masyarakat, salah satunya melalui pemberian pelayanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang dilakukan melalui kerjasama pemerintah daerah dengan instansi/lembaga yang bergerak di bidang hukum

No	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
24	Optimalisasi kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam rangka penciptaan sinergitas dan peningkatan kualitas pembangunan daerah	24.1	Meningkatkan peran serta akademisi, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah melalui Kelompok Interaktif Masyarakat (KIM) dan Forum Interaktif Masyarakat (FIM)
25	Meningkatkan pembangunan yang responsif gender secara berkelanjutan	25.1	Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak
26	Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat	26.1	Peningkatan kualitas hubungan antar masyarakat
27	Peningkatan kualitas sarpras ibadah melalui insentif dan keswadayaan masyarakat	27.1	Peningkatan kualitas kegiatan keagamaan menginisiasi gerakan “Sukamara Mengaji” bagi umat Islam, serta bagi umat beragama lain Menyesuaikan

**Tabel 2.3**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023**

ARAH KEBIJAKAN				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam Rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan Fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan Ekonomi Berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, Dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang Optimal	Peningkatan kerjasama antara Pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk Mencapai Keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara Melalui Pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala Bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, berbasis kerakyatan sarana prasarana Infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan Bermartabat

## 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran akan tercapai ketika strategi yang digunakan tepat. Kabupaten Sukamara selalu optimistis mampu mencapai sasaran berbekal strategi matang untuk seluruh lini yang ingin dibenahi.

Adapun strategi Kabupaten Sukamara mencakup penentuan kebijakan, program, serta kegiatan. Untuk itu sebaiknya terlebih dahulu membahas secara singkat tentang arti dari kebijakan, program, serta kegiatan.

**Kebijakan** : pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait lalu ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. Maka pedoman itulah yang nanti dijadikan petunjuk bagi setiap kegiatan demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

**Program** : adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

**Kegiatan** : adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/ kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kabupaten Sukamara melaksanakan reuiu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Terutama, indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Pembangunan Kabupaten Sukamara Tahun 2019 – 2023 yang merupakan gambaran kinerja Pemerintahan Daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta merupakan tolok ukur keberhasilan Visi dan Misi Bupati Sukamara, disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan**  
**Pemerintah Kabupaten Sukamara 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi i Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Target Kinerja			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66.98	67,95	68,03	68,62	69,21	69,81	69,81
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	53,0	53.0	54.00	54.5	55.00	55.5	55.5
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	6.19	6,05	1,98	2,4	4,13	4,8	4,8
4	Angka Kemiskinan	%	3.36	3.36	3.36	3.36	3.2	3.2	3.20
5	PDRB Per Kapita (ADHK)	Juta Rupiah/ Tahun	42.36	65,18	66,27	70,27	74,52	79,02	79,02
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,83	3.57	3.13	2,72	2,33	1,98	1.98
7	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Skor	TAD	45.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00
8	Indeks Gini	Nilai	82,00	0,33	0,3	0,29825	0,2965	0,29475	0,29475

**Tabel 2.5**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1 : Membangun Manajemen Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, dan Demokratis Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat						
1	Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata Kelola Pemerintah yang baik		Nilai Pelaksanaan reformasi birokrasi meningkatnya dari 45 menjadi tahun 60 diakhir periode	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	WTP
					Nilai LkjIP	BB (>70)
					Indeks Kepuasan Masyarakat	95
					Tingkat Maturiti SPIP	Terdefinisi
					Nilai EKPPD	Sangat Tinggi (minimal 4,21)
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Masyarakat yang terdidik dan sehat						
2	Mewujudkan masyarakat sukamara yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 67,52 menjadi 69,81 diakhir RPJMD	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Harapan Lama Sekolah	12,95
					Rata-rata Lama Sekolah	8,64
					Angka Harapan Hidup	71,6
					Presentase Balita Gizi Buruk	≤ 1
					Konsumsi per kapita	9137
Misi 3 : Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur Dan Berkeadilan						
	Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Gini Ratio	Gini ratio menurun dari 0,357 menjadi 0,2947 di akhir periode	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	55
					Persentase penduduk berakses air Minum	35
					Rasio jaringan Irigasi	95



					Cakupan layanan Telekomunikasi	100
					Persentase rumah tinggal bersanitasi	77,80
					Persentase rumah tangga pengguna Listrik	99,50
				Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	30

**Misi 4 : Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri, Dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup**

Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi bertahan di 4,18 pada akhir periode	Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	1,98
				Tingkat partisipasi kerja	65,94
				Angka kemiskinan	2,79
				Tingkat inflasi	4
				PDRB Per Kapita ADHB	79,02
			Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB)	1.590.346,7
				Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB)	151.712
				Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB	62
				Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB)	27,14

					Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PM A)	Rp. 714.328.774.198
					Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	100
	Meningkatkan kualitas pendayagunaan dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan		Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Hasil pengukuran indeks kualitas air	< 10
					Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan Lahan	100
<b>Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram Dan Dinamis</b>						
	Mewujudkan masyarakat sukamara yang aman, tertib dan dinamis		Berkurangnya kasus tindakan konflik sosial, radikalisme (kriminal)	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Persentase laporan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	85
					Persentase laporan pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	85
					Indeks Pembangunan Gender	93,10

## 2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu tahapan dalam **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih, dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan sistem manajerial dalam perjanjian kinerja, segala sesuatu menjadi terbuka dan bukannya sekadar tandatangan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1: Membangun Manajemen Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, dan Demokratis Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat						
1	Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintah yang baik		Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkat dari 45 Menjadi 60 Diakhir Periode	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggara an pelayanan publik	Opini BPK	WTP
					Nilai LkjIP	BB (>70)
					Indeks Kepuasan Masyarakat	95
					Tingkat Maturiti SPIP	Terdefinisi
					Nilai EKPPD	Sangat Tinggi (minimal 4,21)
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Masyarakat						
	Mewujudkan Masyarakat Sukamara yang berdaya saing		Nilai IPM Meningkat dari 67,52 menjadi 69,81 diakhir periode RPJM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggara an pelayanan pendidikan dan kesehatan	Harapan Lama Sekolah	12,95
					Rata-rata Lama Sekolah	8,64
					Angka Harapan Hidup	71,6
					Presentase	< 1

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4	5	6	7
					Balita Gizi Buruk	
					Konsumsi per kapita	9137
<b>Misi 3 : Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur Dan Keadilan</b>						
	Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat		Gini Ratio Menurun dari 0,357 menjadi 0,2947 di akhir periode	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	55
					Persentase penduduk berakses air minum	35
					Rasio jaringan irigasi	95
					Cakupan layanan Telekomunikasi	100
					Persentase rumah tinggal bersanitasi	77,80
					Persentase rumah tangga pengguna listrik	99,50
				Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Rasio rumah layak huni (jumlah rumah)	30
<b>Misi 4 : Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri, Dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup</b>						
	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing		Pertumbuhan ekonomi bertahan di 4,18 pada akhir periode	Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	1,98
					Tingkat partisipasi kerja	65,94
					Angka kemiskinan	2,79
					Tingkat inflasi	4
					PDRB Per Kapita ADHB	79,02
				Meningkatnya Peran Sektor Pertanian, Perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB)	1.590.346,7
					Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB)	151.712

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4	5	6	7
					Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB	62
					Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB)	27,14
					Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA )	Rp. 714.328.774.198
					Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	100
	Meningkatnya kualitas pendayagunaan dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan		Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 53,00 menjadi 55,00. di akhir periode	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Hasil pengukuran indeks kualitas air	< 10
					Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	100
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram Dan Dinamis						
	Mewujudkan masyarakat Sukamara yang aman, tertib dan dinamis		Kasus tindakan konflik sosial dan radikalisme berkurang dari 33 kasus menjadi 3 kasus diakhir periode	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi	Persentase laporan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	85
					Persentase laporan pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	85
					Indeks Pembangunan Gender	93,10

## 2.5 RENCANA ANGGARAN 2023

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Sukamara dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara dengan total belanja Daerah sebesar Rp.,-. Anggaran Belanja Daerah merupakan bagian dari APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023, komposisi belanja APBD Kabupaten Sukamara, sebagai berikut :

**Tabel 2.7**

### BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	Anggaran (Rp.)
1	Belanja Operasi	566.570.921.834,00
2	Belanja Modal	140.362.360.634,00
3	Belanja Tidak Terduga	19.383.251.637,00
4	Belanja Transfer	79.461.661.264
<b>Jumlah</b>		<b>805.778.195.369,00</b>

*Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara*

**Tabel 2.8**

### ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2023

NO	INDIKATOR SASARAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1	Opini BPK	107.629.939.981
2	Nilai LkjIP	2.086.722.450
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	12.207.240.198
4	Tingkat Maturiti SPIP	737.755.000
5	Nilai EKPPD	512.859.400
6	Harapan Lama Sekolah	53.001.975.261
7	Rata-rata Lama Sekolah	
8	Angka Harapan Hidup	30.674.035.001
9	Presentase Balita Gizi Buruk	16.412.644.448
10	Konsumsi per kapita	-
11	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	47.621.769.946
12	Persentase penduduk berakses air minum	1.607.660.000
13	Rasio jaringan irigasi	9.992.709.237
14	Cakupan layanan Telekomunikasi	1.161.546.000
15	Persentase rumah tinggal bersanitasi	36.804.378.244
16	Persentase rumah tangga pengguna listrik	-
17	Rasio Rumah Layak Huni (Jumlah Rumah)	1.823.285.000
18	Tingkat pengangguran terbuka	-
19	Tingkat partisipasi kerja	4.253.570.834
20	Angka kemiskinan	4.104.631.056
21	Tingkat inflasi	-
22	PDRB Per Kapita ADHB	-
23	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB)	20.142.148.229

NO	INDIKATOR SASARAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)
24	Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB)	10.511.994.708
25	Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB	3.490.083.140
26	Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB)	1.983.765.431
27	Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	598.200.000
28	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	670.482.406
29	Hasil pengukuran indeks kualitas air	117.192.738
30	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	2.396.982.500
31	Persentase laporan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang Ditindaklanjuti	5.173.858.279
32	Persentase laporan pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	403.666.318
33	Indeks Pembangunan Gender	619.446.500
<b>JUMLAH</b>		<b>376.740.542.305</b>

*Sumber: Bagian Organisasi dan BPKAD Kabupaten Sukamara (diolah)*



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara dilakukan dengan sistem desk timbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Sukamara tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

**TABEL 3.1**  
**SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA**

Urutan	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
I	90,01 % ≤ 100%	Sangat Tinggi
II	75,01 % ≤ 90 %	Tinggi
III	65,01% ≤ 75%	Sedang
IV	50,01% ≤ 65%	Rendah
V	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Secara umum Pemerintah Kabupaten Sukamara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2018–2023, sebagaimana di sajikan pada Lampiran 4.

Sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum adalah sebagai berikut :

- Misi I terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 5 indikator sasaran;
- Misi II terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 5 Indikator sasaran;
- Misi III terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator sasaran;
- Misi IV terdapat 2 tujuan, 3 sasaran dan 13 indikator sasaran;

- Misi V terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator sasaran;  
(5 Misi, 6 Tujuan, 8 Sasaran, dan 33 Indikator Sasaran)

**TABEL 3.2**  
**PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023**

NO	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1	MISI 1	1	1	5	ST=3 T=1, S=0, R=1, SR=0
2	MISI 2	1	1	5	ST=5 T=0, S=0, R=0, SR=0
3	MISI 3	1	2	7	ST=3 T=0, S=0, R=1, SR=3
4	MISI 4	2	3	13	ST=7 T=1, S=2, R=0, SR=3
5	MISI 5	1	1	3	ST=2 T=0, S=0, R=0, SR=1
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	

Dari 8 (delapan) sasaran dengan 33 indikator sasaran, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara, adalah :

**TABEL 3.3**  
**PERSENTASE KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN**  
**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023**

No	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
<b>MISI I (5 INDIKATOR SASARAN)</b>			
1	SANGAT TINGGI	3	60
2	TINGGI	1	10
3	SEDANG	0	0
4	RENDAH	0	0
5	SANGAT RENDAH	1	10
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>100</b>
<b>MISI II (5 INDIKATOR SASARAN)</b>			
1	SANGAT TINGGI	5	100
2	TINGGI	0	0
3	SEDANG	0	0
4	RENDAH	0	0
5	SANGAT RENDAH	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>100</b>
<b>MISI III (7 INDIKATOR SASARAN)</b>			
1	SANGAT TINGGI	3	42,9
2	TINGGI	0	0
3	SEDANG	0	0
4	RENDAH	1	14,3
5	SANGAT RENDAH	3	42,8
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	<b>100</b>

No	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
<b>MISI IV (13 INDIKATOR SASARAN)</b>			
1	SANGAT TINGGI	7	53,8
2	TINGGI	1	7,7
3	SEDANG	2	15,4
4	RENDAH	0	0,0
5	SANGAT RENDAH	3	23,1
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>	<b>100</b>
<b>MISI V (3 INDIKATOR SASARAN)</b>			
1	SANGAT TINGGI	2	66,7
2	TINGGI	0	0
3	SEDANG	0	0
4	RENDAH	0	0
5	SANGAT RENDAH	1	33,3
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>	<b>100</b>

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 8 sasaran yang mencakup 33 indikator sasaran, diketahui bahwa indikator sasaran atau **60,61%** Sangat Tinggi/Baik sekali, indikator sasaran atau **6,06%** Tinggi/Baik, indikator sasaran atau **6,06 %** Sedang/Cukup, indikator sasaran atau **3,03%** Rendah/Kurang, indikator sasaran atau **24,24%** Sangat Rendah/Sangat Kurang. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **87,48%** atau bermakna **Tinggi**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 bermakna Tinggi dalam capaian kinerjanya.

### 3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Sukamara untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2023.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Sukamara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2018-2023 maupun RKPD Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Sukamara Tahun 2023, telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran dengan 33 (tiga puluh delapan) indikator sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran	1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pelayanan publik	Sebanyak	5	Indikator
---------	---	--	----------	---	-----------

Sasaran	2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Sebanyak	5	Indikator
Sasaran	3	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	Sebanyak	6	Indikator
Sasaran	4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan Kumuh	Sebanyak	1	Indikator
Sasaran	5	Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat Pengangguran	Sebanyak	5	Indikator
Sasaran	6	Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Sebanyak	6	Indikator
Sasaran	7	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Sebanyak	2	Indikator
Sasaran	8	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas Pembangunan	Sebanyak	3	Indikator

Secara umum Pemerintah Kabupaten Sukamara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**PENGUKURAN KINERJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023**

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	2023		
					Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pelayanan publik	1.1	Opini BPK	Opini	WTP	*WTP	100%
		2.2	Nilai LkjIP	Nilai	BB (>70)	*B (>60)	85,70%
		3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	95	90,41	95,17%
		4.4	Tingkat Maturiti SPIP	Kategori	Terdefinisi	Terdefinisi	100%
		5.5	Nilai EKPPD	Nilai	Sangat Tinggi (minimal)	Rendah (2,58)	61,28%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan Kesehatan		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,95	12,16	93,90%
		2.2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,64	8,17	94,56 %
		2.3	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,6	74,12	103,58%
		2.4	Presentase Balita Gizi buruk	%	≤ 1	0,45	100%
		2.5	Konsumsi per kapita	Ribuan/kapita/tahun	9137	9 494	103,91%

3	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	3.1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	55	35,34	64,25%
		3.2	Persentase penduduk berakses air minum	%	35	32,32	92,34%
		3.3	Rasio jaringan irigasi	%	95	42,11	44,33%
		3.4	Cakupan layanan Telekomunikasi	%	100	94,00	94,00%
		3.5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	77,80	18,26	23,47%
		3.6	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	99,50	N/A	n/a
4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	4.1	Rasio rumah layak huni (jumlah rumah)	Unit	30	42	140%
5	Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	5.1	Tingkat pengangguran terbuka	%	1.98	5.23	37.86%
		5.2	Tingkat partisipasi kerja	%	65.94	72.39	109.78%
		5.3	Angka kemiskinan	%	2.79	3.96	70.45%
		5.4	Tingkat inflasi	%	4	5.64	70.92%
		5.5	PDRB Per Kapita ADHB	(Juta rupiah/tahun)	79.02	86.09	108.95%
6	Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	6.1	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB)	(Juta/tahun)	1.590.346,7	1.814.467,2	114.09%
		6.2	Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB)	(Juta/tahun)	151.712	170.746.5	112.55%
		6.3	Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB	(Juta/tahun)	62	100.90	162.74%
		6.4	Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB)	%	27.14	21.71	79.99%
		6.5	Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	714.328.774.198	351.335.155.152	49.18%
		6.6	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	%	100	93.10	93.10%

7	Meningkatnya kualitas hidup yang Lestari	7.1	Hasil pengukuran indeks kualitas air	%	< 10	<5	100.00%
		7.2	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	%	100	47.85	47.85%
8	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	8.1	Persentase laporan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang Ditindaklanjuti	%	85	87.69	103.16%
		8.2	Persentase laporan pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	%	85	86.02	101.20%
		8.3	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93.1	N/A	0.00%

\*Nilai 2022

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran di atas dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023**

NO.	PREDIKAT	RATA-RATA % CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR
1	Sangat Baik	>90	20
2	Baik	75.00 – 89.99	2
3	Cukup	65.00 – 74.99	2
4	Kurang	50.00 – 64.99	2
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	5
6	n/a		2
		<b>Jumlah</b>	<b>33</b>

Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49.9	50.00 – 64.99	65.00 – 74.99	75.00 – 89.99	>90
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
A. Misi 1								
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pelayanan publik	5	88,43 %		1		1	3
B. Misi 2								
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan Kesehatan	5	99,18 %					5
C. Misi 3								
3	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	6	53,07%	3	1			2
4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	1	140,00%					1
D. Misi 4								
5	Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	5	79,59%	1		2		2
6	Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	6	101,94%	1			1	4
7	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	2	73,93%	1				1
E. Misi 5								
8	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	3	68,12 %	1				2



### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Sukamara dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara dengan total belanja daerah sebesar **Rp 805.778.195.369,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp 732.441.791.657,18** atau dengan serapan dana APBD mencapai **90,90 %**.

Anggaran Belanja Daerah merupakan bagian dari APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023, komposisi belanja APBD Kabupaten Sukamara, sebagai berikut :

Tabel 3.8

#### KOMPOSISI BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2023 (SEBELUM DILAKUKAN AUDIT BPK-RI)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>566.570.921.834,00</b>	<b>520.945.844.678,52</b>	<b>91.95%</b>
	Belanja Pegawai	250.680.802.270,00	234.370.048.269,50	93.49%
	Belanja Barang dan Jasa	244.319.440.098,00	216.857.601.435,02	88.76%
	Belanja Subsidi	3.440.000.000,00	3.286.849.500,00	95.55%
	Belanja Hibah	66.144.499.466,00	64.576.479.974,00	97.63%
	Belanja Bantuan Sosial	1.986.180.000,00	1.857.008.500,00	93.50%
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>140.362.360.634,00</b>	<b>132.032.142.714,66</b>	<b>94.07%</b>
	Belanja Modal Tanah	726.010.000,00	21.606.879,00	2.98%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.159.614.515,00	27.648.654.147,00	91.67%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.576.459.115,00	35.094.332.774,81	93.39%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigiasi	71.070.430.294,00	68.439.941.664,85	96.30%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	804.846.710,00	802.743.249,00	99.74%
	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	24.864.000,00	99.46%
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>19.383.251.637,00</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	Belanja Tidak Terduga	19.383.251.637,00	0	0.00%
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>79.461.661.264,00</b>	<b>79.461.661.264,00</b>	<b>100,00%</b>
	Belanja Bagi Hasil	1.030.427.412,00	1.030.427.412,00	100,00%
	Belanja Bantuan Keuangan	78.431.233.852,00	78.431.233.852,00	100,00%
<b>Jumlah</b>		<b>805.778.195.369,00</b>	<b>732.441.791.657,18</b>	<b>90,90 %</b>

Jika dilihat dari komposisinya, belanja pegawai memberikan kontribusi sebesar 32% dari realisasi belanja Kabupaten Sukamara di tahun 2023 dan sisanya sebesar 68% disumbangkan oleh belanja langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Sukamara yang diperjanjikan pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp 376.740.542.305,-** Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2023 adalah sebesar **Rp**

336.827.203.929,48,- atau 89,41 % , dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023**

Gambar 1

NO	INDIKATOR SASARAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Opini BPK	107.629.939.981	87.017.225.733,00	80.85%
2	Nilai LkjIP	2.086.722.450	1.686.783.093,00	80.83%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	12.207.240.198	10.579.762.716,00	86.67%
4	Tingkat Maturiti SPIP	737.755.000	732.929.876,00	99.35%
5	Nilai EKPPD	512.859.400	512.143.319,00	99.86%
6	Harapan Lama Sekolah	53.001.975.261	50.360.127.398,49	95.02%
7	Rata-rata lama sekolah			
8	Angka Harapan Hidup	30.674.035.001	26.656.371.832,99	86.90%
9	Presentase Balita Gizi buruk	16.412.644.448	15.430.919.782,97	94.02%
10	Konsumsi per kapita	-	-	-
11	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	47.621.769.946	44.639.168.754,38	93.74%
12	Persentase penduduk berakses air minum	1.607.660.000	1.588.044.487,00	98.78%
13	Rasio jaringan irigasi	9.992.709.237	9.945.157.138,00	99.52%
14	Cakupan layanan Telekomunikasi	1.161.546.000	1.142.022.015,00	98.32%
15	Persentase rumah tinggal bersanitasi	36.804.378.244	34.943.915.374,07	94.94%
16	Persentase rumah tangga pengguna listrik	-	-	-
17	Rasio rumah layak huni (jumlah rumah)	1.823.285.000	1.806.541.458,00	99.08%
18	Tingkat pengangguran terbuka	-	-	-
19	Tingkat partisipasi kerja	4.253.570.834	3.816.745.528,00	89.73%
20	Angka kemiskinan	4.104.631.056	3.839.969.247,00	93.55%
21	Tingkat inflasi	-	-	-
22	PDRB Per Kapita ADHB	-	-	-
23	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB)	20.142.148.229	18.458.430.025,00	91.64%
24	Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB)	10.511.994.708	10.400.100.764,00	98.94%
25	Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB	3.490.083.140	3.345.076.682,58	95.85%
26	Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB)	1.983.765.431	1.788.898.224,00	90.18%
27	Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	598.200.000	253.389.379,00	42.36%
28	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	670.482.406	469.733.454,00	70.06%
29	Hasil pengukuran indeks kualitas air	117.192.738	94.250.942,00	80.42%
30	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan Lahan	2.396.982.500	2.186.376.846,00	91.21%
31	Persentase laporan pelanggaran ketertarikan dan ketertiban yang Ditindaklanjuti	5.173.858.279	4.181.438.409,00	80.82%

32	Persentase laporan pelanggaran perda yang Ditindaklanjuti	403.666.318	353.989.208,00	87.69%
33	Indeks Pembangunan Gender	619.446.500	597.692.243,00	96.49%
<b>JUMLAH</b>		<b>376.740.542.305</b>	<b>336.827.203.929.48</b>	<b>89,41%</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja sasaran, yang diperjanjikan Pemerintah Kabupaten Sukamara pada Tahun 2023. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Sukamara, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.10**

**EFEKTIFITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN SASARAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023**

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Persentas e Rata-Rata Capaian Sasaran	Anggaran		Tingkat efektifitas
				Realisasi (Rp)	%	
A. Misi 1						
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pelayanan Publik	5	88.43%	100,528,844,737.00	81.61%	108.36%
B. Misi 2						
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan	5	99.18%	92,447,419,014.45	92.37%	107.37%
C. Misi 3						
3	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	6	53.07%	92,258,307,768.45	94.93%	55.90%
4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan Kumuh	1	140.00%	1,806,541,458.00	99.08%	141.30%
D. Misi 4						
5	Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	5	79.59%	7,656,714,775.00	91.61%	86.88%
6	Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	6	101.94%	34,715,628,528.58	92.83%	109.81%
7	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	2	73.93%	2,280,627,788.00	90.71%	81.50%
E. Misi 5						

8	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	3	68.12%	5,133,119,860	82.83%	82.24%
---	---	---	--------	---------------	--------	--------

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2023 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Sukamara.

### Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 33 sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 17 sasaran strategis. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.11**  
**TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
<b>A. Misi 1</b>					
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pelayanan Publik	5	88.43%	81.61%	6.82%
<b>B. Misi 2</b>					
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan Kesehatan	5	99.18%	92.37%	6.81%
<b>C. Misi 3</b>					
3	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	6	53.07%	94.93%	-41.86%
4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	1	140.00%	99.08%	40.92%
<b>D. Misi 4</b>					
5	Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	5	79.59%	91.61%	-12.02%
6	Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	6	101.94%	92.83%	9.11%
7	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	2	73.93%	90.71%	-16.78%
<b>E. Misi 5</b>					

8	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	3	68.12%	82.83%	-14.71%
---	---	---	--------	--------	---------

## ANALISIS PENCAPAIAN PER SASARAN STRATEGI

**Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik**

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran- sasaraannya berupa Opini BPK, Nilai LKJiP, Indeks Kepuasan Masyarakat, Tingkat Maturiti sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Nilai EKPPD. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun kelima RPJMD Kabupaten Sukamara 2018 – 2023, dapat dilihat pada 5 indikator sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2023 Target Akhir Tahun RPJMD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1	Opini BPK	WTP	*WTP	100	WTP	*WTP	100%	WTP
2	Nilai LKJiP	B (>60)	B (>60)	100	BB (>70)	*B (60,85)	85,70%	BB (> 70)
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	83,13	87,51	95	90,41	95,17%	95
4	Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terdifinisi	Terdefinisi	100	Terdefinisi	Terdefinisi	100%	Terdefinisi
5	Nilai EKPPD	Tinggi (minimal 3,41)	N/A	N/A	Sangat Tinggi (minimal 4,21)	Rendah (2,58)	61,28 %	4,21/Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		77,50 %			88,43 %			

\*Nilai Tahun 2022

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat dari sebanyak 5 indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator 1 yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 masih dalam proses audit oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, yang mana nilai pada Laporan ini masih menggunakan opini tahun 2022. Target Indikator ini dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). untuk Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sukamara telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 11

kali berturut-turut sejak tahun 2012. Hal ini menunjukkan akuntabilitas keuangan maupun kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara sudah berada di level tinggi, namun demikian perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas

kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Capaian kinerja indikator 2 “Nilai LKjIP” Tahun 2023 masih dalam proses evaluasi, yang mana nilai LKjIP ini masih menggunakan nilai tahun 2022. Target indikator ini dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 yaitu nilai BB(>70).

Capaian kinerja indikator 3 “Indeks Kepuasan Masyarakat” adalah sebesar 90,41% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 95,17%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 3 “Indeks Kepuasan Masyarakat” tahun ini adalah sebesar 90,41%, bila dibandingkan dengan capaian target Tahun 2022 mengalami kenaikan, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 95,17%.

Capaian kinerja indikator 4 “Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” adalah terdefinisi dari target Terdefinisi yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 4 “Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 tidak mengalami kenaikan/penurunan.

Capaian kinerja indikator 5 “Nilai EKPPD” tahun 2022 terhadap LPPD Kabupaten Sukamara adalah sebesar 2.5787 dengan kategori Rendah.

Implementasi kebijakan strategis meningkatkan kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja birokrasi pada tahun 2023 dilaksanakan melalui program sesuai dengan urusan penunjang pemerintahan, urusan perencanaan, urusan keuangan, urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, urusan komunikasi dan informasi, urusan Perpustakaan dan kearsipan, pada Perangkat Daerah BKPSDM, Inspektorat Daerah, BPKAD, Diskominfo Sandi, Bappeda, Dispursip, Bagian Organisasi, Bagian Hukum pada setda Kabupaten Sukamara sedangkan untuk program perencanaan selain di Bappeda tersebar juga di Perangkat Daerah yang lain dan Kecamatan.

## 1. Opini BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Akrutitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan Keuangan.



Pemerintah Kabupaten Sukamara bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Berdasarkan laporan BPK RI, bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara pada tahun 2022 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara tanggal 31 Desember 2022 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Kemudian untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut. BPK RI juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas maka BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaan dalam Laporan Nomor 48.A/LHP/XIX.PAL/05/2023 tanggal 08 Mei 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 belum diumumkan sampai dengan penyusunan Laporan ini, sehingga belum dapat dibandingkan capaian kinerjanya terhadap target tahun 2023, terhadap capaian tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023.

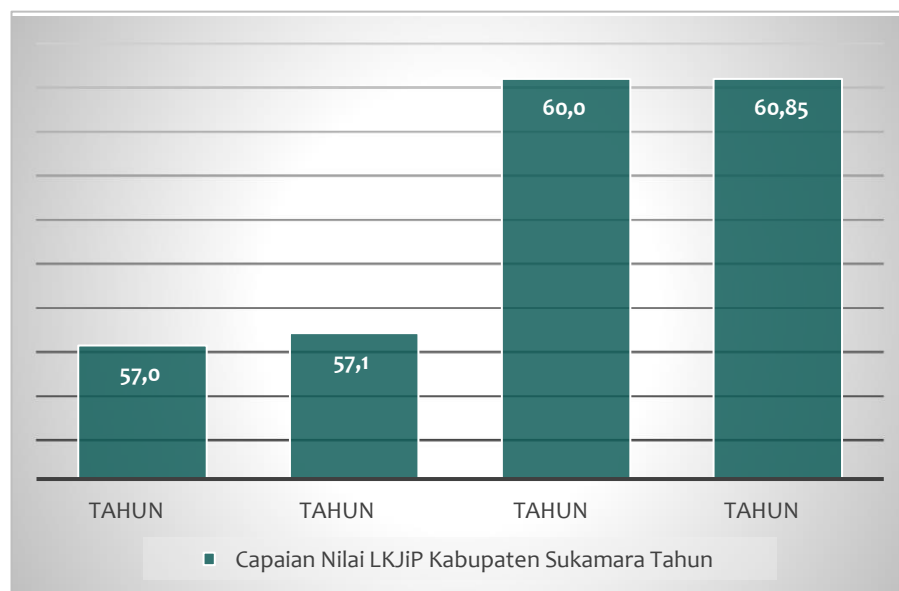
Upaya yang dilakukan tahun 2023 untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain:

- a. Taat azas pelaksanaan APBD ;
- b. Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi dan diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan;
- c. Laporan keuangan telah memperoleh reviu yang memadai dari Inspektorat Daerah;
- d. Inspektorat Daerah dapat memberikan hasil Cash Opname dan Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2021 yang telah direviu sehingga dapat membantu BPK dalam meyakini saldo Kas dan Persediaan dalam LKPD TA 2022;
- e. Laporan keuangan merupakan hasil penyusunan masing-masing SKPD bukan merupakan hasil Bidang Akuntansi saja;
- f. Penguatan komitmen dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. Penguatan komitmen dan integritas pimpinan perangkat daerah, para pengelola dan pelaksana kegiatan.

## 2. Nilai LKJiP

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara

periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai LKjIP Kabupaten diukur sesuai dengan Permenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Atas Implementasi SAKIP. Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil LKjIP Kabupaten Sukamara tahun 2022 adalah **60,85** atau kategori **B** tidak sesuai target yang dicanangkan pada awal tahun RPJMD, awal target RPJMD pada tahun 2023 adalah BB (>70) Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Kabupaten Sukamara tahun 2023 tidak sesuai target yang di perjanjikan. Pada Tahun 2022 Kabupaten Sukamara mendapatkan predikat B sama dengan tahun sebelumnya namun terdapat kenaikan pada nilai dari tahun sebelumnya, selanjutnya akan terus dilakukan usaha perbaikan dan peningkatan kinerja sehingga dapat berdampak pada meningkatnya nilai LKjIP, capaian nilai LKjIP dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



#### Faktor Penghambat

- Metode pengumpulan data kinerja yang dibutuhkan belum sesuai dengan kebutuhan data.
- Target dan realisasi kinerja/sasaran kinerja pada beberapa perangkat daerah yang masih belum sesuai dengan RPJMD
- Belum ada sistem yang terintegrasi terkait dengan perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja untuk meningkatkan implementasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah.

#### Faktor Keberhasilan

- Komitmen dari seluruh *stakeholders* untuk peningkatan kinerja pada setiap Perangkat Daerahnya.
- Adanya Kesesuaian antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten.

#### Solusi

- Perlu adanya Pengembangan aplikasi untuk pengelolaan SAKIP (dalam hal ini masih dilakukan penjajakan dalam pengadaan Sistem aplikasi E-SENGGUH yang bekerja sama dengan BAPPEDA D.I.Y).
- Perbaikan pada Dokumen Perencanaan kerja beberapa Perangkat Daerah dalam hal ini dapat dilakukan pembimbingan atau pendampingan dari BAPPEDA.
- Perjanjian kinerja disesuaikan dengan RPJMD untuk mendapatkan sasaran kinerja yang sesuai dengan target RPJMD sehingga ada kesesuaian data yang dikumpulkan dengan data yang diperlukan dalam penyusunan LKIP Kabupaten.

### 3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kinerja pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara dan untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik.

Capaian indikator kinerja indeks kepuasan layanan masyarakat adalah sebesar 90,41% dari target yang ditetapkan dan masuk kategori capaian sangat tinggi.

Secara umum capaian kinerja untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM) tidak mengalami hambatan/kendala yang berarti dimana persentasi pencapaian 90,41% dari target nilai 95,00 dengan capaian nilai 95,17 %. Namun ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dalam peningkatan kualitas nilai IKM berkaitan dengan adanya perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan dan aparatur pelayanan dalam mencapai target
- b. Meningkatnya kompetensi penyelenggara pelayanan perizinan melalui pendidikan dan pelatihan.
- c. Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan pelayanan perizinan melalui peraturan perundang-undangan.
- d. Perbaikan dan pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan perizinan.
- e. Dukungan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Unsur-unsur yang dikeluhkan atau yang mendapatkan respon kurang baik dari masyarakat adalah ketepatan pelaksanaan jadwal waktu pelayanan, kecepatan pelayanan, kesesuaian biaya dan keamanan pelayanan. Unsur-unsur inilah yang akan menjadi perhatian dan diperbaiki pada tahun berikutnya.

### 4. Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 disebutkan bahwa “untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga,

gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan". Tingkat maturitas pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diperoleh melalui proses penilaian SPIP. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen, yaitu; kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP.

Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis.

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) sub unsur pengendalian. Masing-masing sub unsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi.

Pencapaian tujuan organisasi dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP, yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kegiatan yang efektif dan efisien di nilai melalui capaian Output dan Outcome organisasi. Keandalan pelaporan keuangan dinilai melalui capaian opini atas laporan keuangan. Pengamanan aset negara dinilai melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset. Selanjutnya, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dinilai melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI dan keterjadian kasus korupsi.

Implementasi SPIP terintegrasi meliputi Penerapan Manajemen Risiko Pemda, Kapabilitas APIP dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. OPD pemda dapat melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sedangkan Inspektorat melakukan penjaminan kualitas, sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

#### Faktor Keberhasilan

- Adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati Sukamara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
- Dibentuknya Satgas SPIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
- Satgas SPIP telah berusaha semaksimal untuk memenuhi unsur-unsur pengendalian yang ditentukan.
- Telah tersusun rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Inspektorat Daerah.

#### Faktor Penghambat dan Solusi

Tidak ada hambatan dalam pencapaian target kinerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Sukamara

## 5. Nilai EKPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Nilai EKPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. EKPPD 2022 terhadap LPPD Tahun 2021 Kabupaten Sukamara adalah sebesar 2.58 dengan kategori Rendah.

Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai PP. No. 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPI Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

Faktor keberhasilan

1. Adanya dukungan anggaran dan sarana dan prasarana yang memadai
2. Adanya kegiatan sosialisasi dan asistensi penyusunan LPPD bagi Perangkat Daerah
3. Adanya kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun LPPD Kabupaten dengan Tim Daerah EPPD Provinsi Kalimantan Tengah
4. Adanya koordinasi dengan Instansi di luar Lingkup Pemerintah Kabupaten Sukamara terkait data dalam hal ini BPS dan Pertanahan
5. Adanya koordinasi dengan APIP selaku Tim Pereviu Data Dukung LPPD
6. Adanya sinkronisasi penetapan sasaran dan indikator kinerja antara IKU pada LKIP dan IKK pada LPPD
7. Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perangkat Daerah mengarah pada IKK LPPD

Faktor penghambat

1. Masih ada Perangkat Daerah yang belum paham secara komprehensif terkait substansi penyusunan LPPD
2. Terdapat beberapa data/elemen data yang belum diupdate oleh Instansi terkait
3. Data Sasaran dan Indikator Kinerja antara IKU pada LKIP dan IKK pada LPPD di beberapa Perangkat Daerah masih ada yang belum sinkron
4. Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perangkat Daerah masih banyak yang belum mengarah pada IKK LPPD yang dinilai, sehingga Program/Kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan tidak memiliki daya ungkit terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

## Solusi

1. Melakukan asistensi dan pembimbingan secara intensif kepada Perangkat Daerah
2. Melakukan koordinasi langsung kepada Instansi terkait yang berkenaan dengan data/elemen data yang diperlukan dalam penyusunan LPPD Kabupaten
3. Mengusulkan untuk melakukan kegiatan sinkronisasi IKU dan IKK Perangkat Daerah yang dimulai dengan perumusan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah
4. Mengimbau kepada Perangkat Daerah untuk dapat merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan lebih tepat sasaran pada IKK LPPD

### Sasaran 2: Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan

Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sasaran-sasarannya berupa Harapan Lama Sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, persentase balita gizi buruk dan konsumsi per kapita. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun kelima RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023, dapat dilihat pada 5 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2023 Target Akhir Tahun RPJMD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1	Harapan Lama Sekolah	12,75	12,15	95,29%	12,95	12,16	93,90%	12,77
2	Rata – rata lama Sekolah	8,49	8,10	95,41%	8,64	8,17	94,56 %	8,48
3	Angka Harapan Hidup	71,58	71,80	100,31%	71,6	74,12	103,52%	71,6
4	Persentase balita gizi buruk	≤ 1 %	0,56	100%	≤ 1	0,45	100%	≤ 1 %
5	Konsumsi per kapita (ribuan/ kapita/tahun)	8980	9225	102,73 %	9137	9 494	103,91%	8826
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		98,75%			99,18%			

Sasaran Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan dapat dilihat dari 5 indikator yaitu:

**Capaian kinerja indikator 1** “Harapan Lama Sekolah” adalah sebesar 12,16 dari target sebesar 12,95 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 93,90 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 1 “Harapan lama sekolah” tahun ini adalah sebesar 93,90 %, bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 mengalami penurunan, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 95,22 %.

**Capaian kinerja indikator 2** “Rata-rata Lama Sekolah” adalah sebesar 8,17 dari target sebesar 8,64 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga



persentase capaian kinerjanya adalah 94,56 %, capaian ini tidak sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 2 “Rata-rata Lama Sekolah” tahun ini adalah sebesar 94,56 %, bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan target yang tinggi dari sebelumnya namun capaian jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 96,34 %.

**Capaian kinerja indikator 3** “Angka Harapan Hidup” adalah sebesar 72,03 dari target sebesar 71,6 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,52 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 3 “Angka harapan Hidup” tahun ini adalah sebesar 103,52 %, bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 mengalami kenaikan, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 103,52 %.

**Capaian kinerja indikator 4** “Persentase Balita Gizi Buruk” adalah sebesar 0,45 dari target sebesar  $\leq 1$  % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 4 “Persentase Balita Gizi Buruk” tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 tidak mengalami kenaikan/penurunan, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.

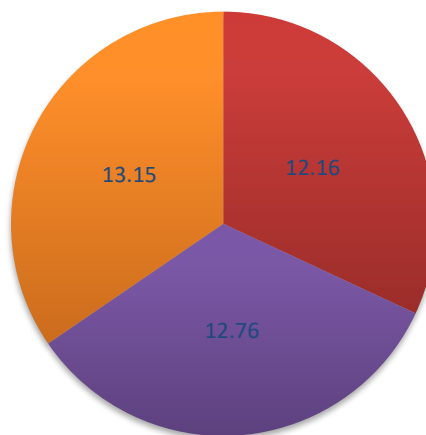
**Capaian kinerja indikator 5** “Konsumsi per kapita” adalah sebesar 9494 dari target sebesar 9137 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,91 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 4 “Konsumsi per kapita” tahun ini adalah sebesar 103,91 %, bila dibandingkan dengan target Tahun 2023 mengalami kenaikan, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 107,57 %.

#### 1. Harapan Lama Sekolah

Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS di Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 sebesar 12,16. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,16 tahun atau setara dengan diploma I. Pada tahun 2023 angka HLS Kabupaten Sukamara mengalami peningkatan dari tahun 2022.

### BENCHMARK HARAPAN LAMA SEKOLAH TAHUN 2023



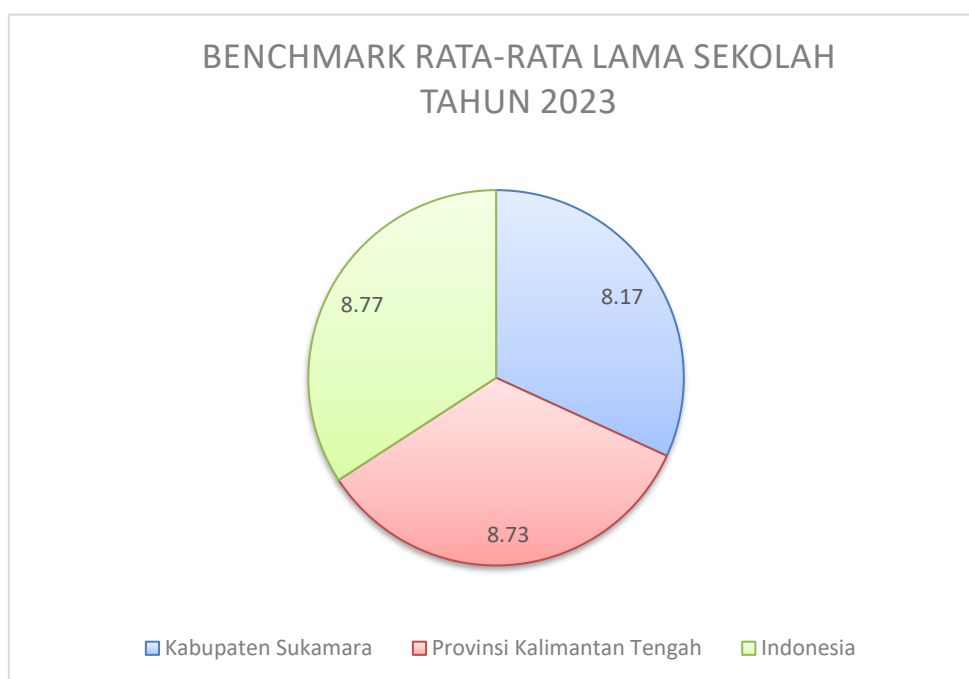
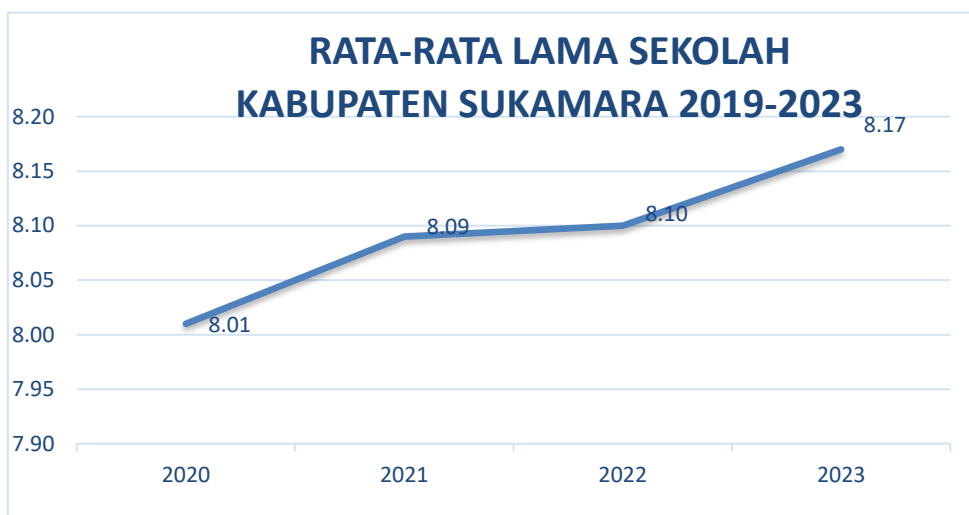
■ Kabupaten Sukamara ■ Provinsi Kalimantan Tengah ■ Indonesia

Berdasarkan Nilai Harapan Lama Sekolah sekolah diatas jika dibandingkan antara Kabupaten Sukamara dengan Provinsi Kalimantan Tengah maka selisih dari Nilai Rata-rata sekolahnya adalah sebesar 0,6 dan Persentase capaian dari Nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukamara adalah sebesar 95%. Jika dibandingkan dengan Nilai Harapan Lama Sekolah Nasional (Indonesia) maka selisih atau perbandingan nilainya adalah sebesar 0,99 dengan persentase nilai dari Nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten sukamara sebesar 92%. Jika dilihat dari persentase tersebut maka dapat dikatakan perbandingan dari Nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten sukamara dengan Provinsi dan Nasional tidak memiliki jarak Nilai yang jauh sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut baik.

#### 2. Rata – rata lama sekolah

Rata- rata lama sekolah menunjukkan rata-rata lamanya penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bersekolah. Indikator ini mempunyai kegunaan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tinggi angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RRLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. Pencapaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten sukamara tahun 2023 mencapai 8.17 tahun lebih tinggi dari capaian tahun 2022 yaitu 8,10 tahun, ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan masyarakat Kabupaten Sukamara dalam mengenyam pendidikan formal. Berikut grafik perkembangan capaian Rata-Rata Lama Sekolah dari tahun 2020-2023.





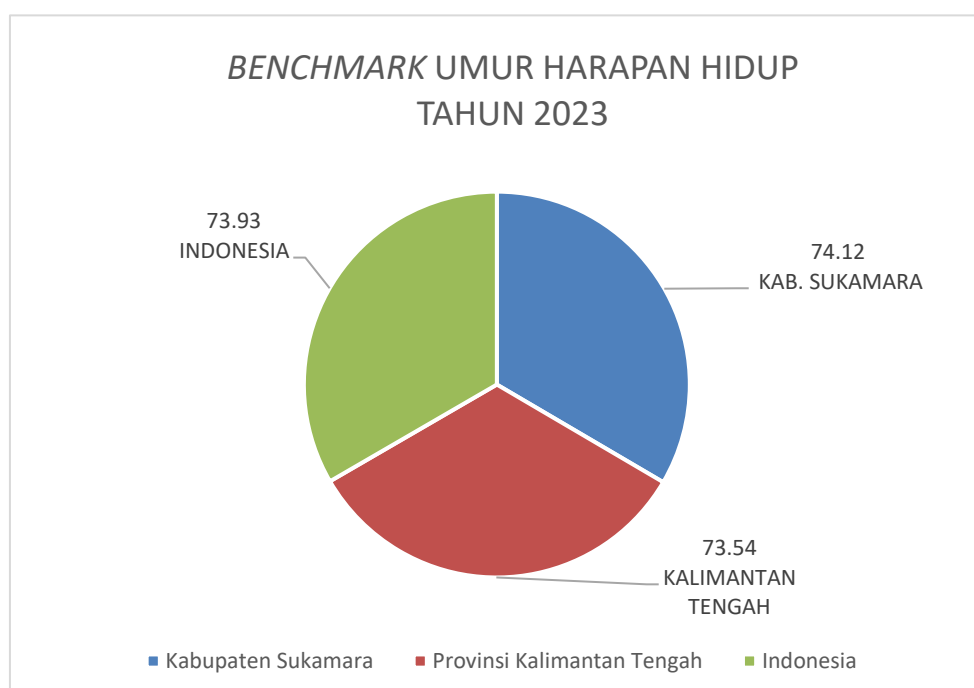
Berdasarkan Nilai rata-rata sekolah diatas jika dibandingkan antara Kabupaten Sukamara dengan Provinsi Kalimantan Tengah maka selisih dari Nilai Rata-rata sekolahnya adalah sebesar 0,56 dan Persentasi capaian dari Nilai rata-rata sekolah Kabupaten Sukamara adalah sebesar 94%. Jika dibandingkan dengan Nilai rata-rata sekolah Nasional (Indonesia) maka selisih atau perbandingan nilainya adah sebesar 0,59 dengan persentasi nilai dari Nilai rata-rata sekolah Kabupaten sukamara sebesar 93%. Jika dilihat dari persentase tersebut maka dapat dikatakan perbandingan dari Nilai rata-rata sekolah Kabupaten Sukamara dengan Provinsi dan Nasional tidak memiliki Selisih yang jauh sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut cukup baik.

### 3. Angka Harapan Hidup

Salah satu cara menilai tingkat kesehatan secara umum adalah dengan melihat Umur Harapan Hidup (AHH). Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan di suatu daerah. Ketika indikator ini mengalami peningkatan, dapat diketahui bahwa tingkat kematian semakin rendah dan

harapan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari semakin panjang. Dengan mengetahui indikator ini, pemerintah diharapkan dapat menentukan arah kebijakan yang tepat tentang indikator kesehatan di Kabupaten Sukamara.

perkembangan Umur Harapan Hidup di Kabupaten Sukamara terus meningkat setiap tahun. Tahun 2023, Umur Harapan Hidup di Kabupaten Sukamara mencapai 72.03 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan hidup sampai 71 atau 72 tahun lagi. Peningkatan Umur Harapan Hidup ini diharapkan dapat sebanding dengan status kesehatan di Kabupaten Sukamara. Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan, status kesehatan memberikan pengaruh pada tingkat produktivitas. Adapun peningkatan Umur Harapan Hidup menciptakan potensi pada peningkatan penduduk lanjut usia. Untuk itu, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk mengembangkan potensi penduduk lanjut usia maupun penduduk usia produktif.



Berdasarkan Umur Harapan Hidup diatas jika dibandingkan antara Kabupaten Sukamara dengan Provinsi Kalimantan Tengah maka dapat disimpulkan bahwa Umur Harapan Hidup Kabupaten Sukamara lebih tinggi 0,58 dan Persentasi capaian dari Umur Harapan Hidup Kabupaten Sukamara adalah sebesar 101,79%. Jika dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup Nasional (Indonesia) Kabupaten Sukamara lebih tinggi 0.19 dengan persentasi nilai dari Umur Harapan Hidup Kabupaten sukamara sebesar 100,26% . Jika dilihat dari persentase tersebut maka dapat dikatakan perbandingan dari Nilai rata-rata sekolah Kabupaten sukamara dengan Provinsi dan Nasional tidak memiliki jarak yang jauh sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut baik.

#### Faktor keberhasilan

- Peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan berdampak pada meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam menjaga pola hidup sehat
- Jumlah alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan di bidang kesehatan
- Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang baik
- Dukungan yang baik dari berbagai pihak baik swasta, lintas sektor, dan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan di bidang kesehatan

#### Faktor penghambat

- Adanya peningkatan kasus penyakit tidak menular dan kasus infeksi penyakit menular
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga pola hidup bersih dan sehat

#### Solusi

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, regulasi, pengelolaan anggaran, sertifikasi Bidang Kesehatan dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan berfokus pada keselamatan pasien, kebutuhan masyarakat dengan menggandeng stake holder, lintas sektor, pihak swasta, dan seluruh elemen masyarakat. Serta memberikan sosialisasi tentang pola hidup bersih dan sehat yang sesuai dengan standar kesehatan.

### 4. Persentase Balita Gizi Buruk

#### Faktor keberhasilan

- Ketersediaan bahan terapi yang memadai untuk tatalaksana kasus gizi buruk
- Ketersediaan Posyandu di masing-masing desa dilengkapi dengan kader serta petugas kesehatan yang baik untuk memberikan edukasi serta sosialisasi mengenai kebutuhan gizi
- Adanya Pengetahuan dari ibu untuk memberikan anak makanan pendamping ASI (MP-ASI) sejak usia 6 bulan, baik dari segi kesesuaian umur, frekuensi, jumlah, tekstur dan variasi makanan. Dimasa ini sangat penting untuk memperhatikan dan menjamin kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
- Adanya aplikasi e-PPBGM untuk deteksi dini masalah gizi sehingga prioritas masalah gizi pada balita lebih cepat ditemukan

#### Faktor penghambat

- Adanya penyakit penyerta sehingga tingkat kesembuhan lama/tidak berhasil
- Kurangnya pengetahuan ibu mengenai makanan beragam dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari
- Kurangnya partisipasi ibu dalam melakukan penimbangan balita di posyandu
- Kurangnya dukungan keluarga

## Solusi

- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM kesehatan dan kader posyandu pada pelaksanaan tata laksana kasus gizi buruk
- Aktif melakukan sosialisasi dan edukasi dalam pemenuhan nutrisi bagi anak khususnya bagi anak-anak balita yang sedang dalam masa pertumbuhan
- Menciptakan dan melaksanakan gerakan sadar gizi dan pentingnya konsumsi makanan gizi seimbang dimulai dari ibu hamil sampai kepada anak-anak contoh seperti gerakan gemar makan ikan atau wajib 1 telur 1 hari bagi anak-anak dan bayi mulai dari usia 6 bulan
- Kerjasama lintas sektor untuk program pencegahan dan penanganan balita gizi buruk

## 5. Konsumsi per kapita (ribuan/ kapita/tahun)

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga sebulan dibagi Jumlah anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain se Provinsi Kalimantan Tengah maka Kabupaten Sukamara adalah Kabupaten yang pengeluaran perkapitanya terendah diangka 9.494 jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah maka selisih nilainya sebesar 2.384 dimana Rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi Kalimantan Tengah diangka 11.878 dan persentase perbandingannya 79,93%. Sedangkan dengan Nasional tidak dapat dibandingkan dikarenakan tidak tersedianya data pembanding.

## Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar. Sasaran-sasarannya berupa persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik, persentase penduduk berakses air minum, rasio jaringan irigasi, cakupan layanan telekomunikasi, persentase rumah tinggal bersanitasi, persentase rumah tangga pengguna listrik. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun kelima RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023, dapat dilihat pada 6 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2023 Target Akhir Tahun RPJMD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	48,77	34,78	71,31	55	<b>35,34</b>	64,25%	55
2	persentase penduduk berakses air minum	35	19,92	56,91	35	32,32	92,34%	35
3	rasio jaringan irigasi	87,29	63,77	73,06	95	42,11	44,33%	95
4	cakupan layanan telekomunikasi	97	90,60	93,40	100	94,00	94,00%	100

5	persentase rumah tinggal bersanitasi	76,70	0	0	77,80	18,26	23,47%	77,80
6	persentase rumah tangga pengguna listrik	99,00	95,41	96,37	99,50	N/A	N/A	99,50
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		65,18 %			53,07 %			

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar dapat dilihat dari 6 indikator yaitu:

Capaian kinerja indikator 1 “persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik” adalah sebesar 35,34 dari target sebesar 55 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 64,25 %, capaian ini tidak sesuai dari target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 1 “persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik” tahun ini adalah sebesar 64,25 %, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 64,25 %.

Capaian kinerja indikator 2 “persentase penduduk berakses air minum” adalah sebesar 32,32 dari target sebesar 35 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 92,34 %, capaian ini tidak sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 2 “persentase penduduk berakses air minum” tahun ini adalah sebesar 56,91 %, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 56,91 %.

Capaian kinerja indikator 3 “rasio jaringan irigasi” adalah sebesar 42,11 dari target sebesar 95 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 44,33 %, capaian ini tidak sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 3 “rasio jaringan irigasi” tahun ini adalah sebesar 44,33 %, bila dibandingkan dengan target Tahun 2023 mengalami penurunan, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 44,33 %.

Capaian kinerja indikator 4 “cakupan layanan telekomunikasi” adalah sebesar 94,00 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 94,00 %, capaian ini tidak sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 4 “cakupan layanan telekomunikasi” tahun ini adalah sebesar 94,00 %, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 94,00 %.

#### 1. Persentase Kondisi Jalan dalam Kondisi Baik

Faktor penghambat ketidaktercapaian indikator ini, antara lain :

- Terdapat beberapa paket pekerjaan yang mengalami gagal lelang, sehingga berpengaruh pada capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan.
- Pemasangan target kinerja tahun 2023 (55%) yang jauh lebih tinggi dibanding tahun 2022 (48,77%), namun tidak dengan alokasi penganggarnya.

Solusi yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi dan mengantisipasi penyebab gagalnya tender.
- b. Melakukan kajian dan analisis dalam penentuan target dengan mempertimbangkan prakiraan alokasi anggaran program dan kegiatan berdasarkan data beberapa tahun terakhir.

## 2. Persentase penduduk berakses air minum

Faktor Penghambat ketidaktercapaian indikator ini, antara lain :

- Kegiatan ini sangat bergantung dengan alokasi penganggaran, dan untuk tahun 2023 alokasi dana hanya bersumber dari dana APBD.

Solusi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan mengupayakan pekerjaan dan pendanaan melalui sumber dana selain APBD.

## 3. Rasio Jaringan Irigasi

Faktor Penghambat ketidaktercapaian indicator ini, antara lain :

- a. Pemasangan target kinerja tahun 2023 (95%) yang jauh lebih tinggi dibanding tahun 2022 (87.29%), namun tidak dengan alokasi penganggarnya.
- b. Kegiatan ini sangat bergantung dengan alokasi penganggaran, dan untuk tahun 2023 alokasi dana hanya bersumber dari dana APBD.

Solusi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan kajian dan analisis dalam penentuan target dengan mempertimbangkan prakiraan alokasi anggaran program dan kegiatan berdasarkan data beberapa tahun terakhir.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan mengupayakan pekerjaan dan pendanaan melalui sumber dana selain APBD

**Sasaran 4: Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh**

Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh. Sasaran-sasarannya berupa Rasio rumah layak huni (jumlah rumah). Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun kelima RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023, dapat dilihat pada 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2023 Target Akhir Tahun RPJMD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1	Rasio rumah layak huni (jumlah rumah)	30	155	516,67	30	42	140	30
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		516,67%			140 %			

Capaian kinerja indikator 1 “Rasio rumah layak huni (jumlah rumah)” adalah sebesar 42 unit dari target sebesar 30 unit yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 140 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 1 “Rasio rumah layak huni (jumlah rumah)” tahun ini adalah sebesar 140 %, bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 mengalami penurunan pencapaian, disebabkan karena tahun 2022 adanya bantuan anggaran DAK dari Pusat. dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 140 %.

#### 1. Rasio Rumah Layak Huni (jumlah rumah)

Kegiatan ini sangat bergantung dengan alokasi penganggaran, dan untuk tahun 2023 alokasi dana hanya bersumber dari dana APBD Kabupaten dan APBD Provinsi, hal ini menyebabkan pada tahun 2023 hanya 42 unit rumah tidak layak huni dibanding dengan tahun 2022 yang mendapat 150 unit rumah dikarenakan adanya dana DAK dan APBN

Solusi yang dapat ditempuh adalah:

Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan mengupayakan pekerjaan dan pendanaan melalui sumber dana selain APBD.

### Sasaran 5 : Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran

Sasaran Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Sasaran-sasarannya berupa Tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka kemiskinan, tingkat inflasi, PDRB per Kapita ADHB. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun keempat RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023, dapat dilihat pada 5 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2023 Target Akhir Tahun RPJMD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1	Tingkat pengangguran Terbuka	2,33	6,46	36,07	1.98	5.23	37.86%	1,98
2	tingkat partisipasi angkatan kerja	65,83	69,82	106,06	65.94	72.39	109.78%	65,94
3	angka kemiskinan	2,93	3,72	78,76	2.79	3.96	70.45%	2,79
4	tingkat inflasi	4	5,62	140,50	4	5.64	70.92%	4
5	PDRB per Kapita ADHB	74,52	81,70	109,63	79.02	86.09	108.95%	79,02
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		80,34%			79,59%			

Capaian kinerja indikator 1 “Tingkat pengangguran terbuka” adalah sebesar 5,23 dari target sebesar 1,98 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 37,86 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, 37,86%, bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 mengalami kenaikan, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 37,86 %.



Capaian kinerja indikator 2 “Tingkat partisipasi angkatan kerja” adalah sebesar 72,39 dari target sebesar 65,94 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 109,78 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, 107,98 %, bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 mengalami kenaikan, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 109,78 %.

Capaian kinerja indikator 3 “Angka Kemiskinan” adalah sebesar 3,96 dari target sebesar 2,79 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 70,45 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, 70,45 bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 mengalami penurunan, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 70,45 %.

Capaian kinerja indikator 4 “Tingkat Inflasi” adalah sebesar 5,64 dari target sebesar 4 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 70,92 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, 70,92%, bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 mengalami penurunan, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 70,92 %.

Capaian kinerja indikator 4 “PDRB per Kapita ADHB” adalah sebesar 86,09 dari target sebesar 79,02 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 108,95%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, 108,95%, bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 mengalami penurunan, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 108,95%.

### 1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)

TPT atau Tingkat Pengangguran Terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Jumlah tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukamara adalah sebesar 5,23% pada tahun 2023, angka tingkat pengangguran terbuka ini lebih tinggi dari pada target yang ditetapkan yaitu 2,33%. Angka tersebut lebih rendah dari tahun 2022 yaitu 6,46%. Jika dibandingkan dengan angka capaian tahun lalu, angka tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan yaitu sebesar 1,23%. Angka tersebut masih menunjukkan suatu kondisi yang memprihatinkan karena jumlah pengangguran masih berada jauh dibawah target yang ditentukan. Dalam menghadapi permasalahan tingkat pengangguran terbuka ini diperlukan adanya program-program yang bisa mempengaruhi pemulihan perekonomian yang lebih berdampak luas bagi masyarakat sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan.





#### FORMULASI PENGUKURAN :

$$\text{TPT} = (\text{JUMLAH PENGANGGURAN} / \text{JUMLAH ANGKATAN KERJA}) * 100\%$$

Dalam data statistik Tahun 2023 Kabupaten Sukamara Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain maka Kabupaten Sukamara merupakan Kabupaten dengan TPT tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini perlu menjadi perhatian Khusus untuk kedepannya agar mampu melihat penyebab dan solusi apa yang perlu dilakukan dalam upaya penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka.

#### Solusi

- Perlu diperhatikan penyebab dari masih tingginya angka pengangguran untuk menentukan arah kebijakan dan program apa yang perlu dilakukan kedepannya
- Dalam rangka penurunan angka TPT perlu untuk di kaji juga Faktor keberhasilannya
- Penyiapan calon tenaga kerja yang kompeten dalam berbagai bidang sehingga mampu berdaya saing untuk mengurangi tingkat pengangguran

## 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari yang merujuk pada waktu dalam periode survei. Dalam kelompok umur muda (15-24 tahun), TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Hal serupa juga terjadi pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Angkatan kerja di Kabupaten Sukamara masih pada tahap yang kurang baik secara pendidikan. Pada tahun 2020, angkatan kerja yang bekerja secara aktif didominasi oleh tingkat pendidikan kurang dari SD. Faktor Keberhasilan Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja yaitu jumlah partisipasi angkatan kerja yang meningkat dari tahun sebelumnya melalui penyerapan di sektor informal. Faktor Penghambat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yaitu Kurangnya program-program pengendalian jumlah angkatan kerja melalui perluasan kesempatan kerja. Solusi: Perlunya peningkatan kesempatan kerja di sektor formal untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Jika dibandingkan dengan TPAK Provinsi Kalimantan Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa TPAK Kabupaten Sukamara lebih tinggi dimana TPAK Kabupaten Sukamara 72,39 sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah 67,18

### 3. Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukamara tahun 2023 sebesar 2,71 ribu jiwa sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 2,48 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin pada periode 2021– 2023 mengalami kenaikan sebanyak 0,23 ribu jiwa. Hal ini sejalan dengan penambahan persentase penduduk miskin jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin tahun 2023 adalah 3,96 atau 0,24 persen poin lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Jika dilihat dari angka kemiskinan Kabupaten Sukamara dan Provinsi Kalimantan Tengah, maka jumlah penduduk miskin 2,71 ribu di Kabupaten Sukamara memberi sumbangsih sebesar 1,9% pada nilai angka miskin Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 142,17. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Lain Kabupaten Sukamara ada di urutan ketiga, sedangkan Kabupaten Lamandau di urutan pertama dengan angka penduduk miskin yang rendah.

### 4. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan per kapita dan laju inflasi. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 4,14 persen, sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami pertumbuhan sebesar 5,64 persen.

### 5. PDRB Per Kapita ADHB

PDRB per kapita adalah pendapatan regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2023, PDRB per kapita secara riil Kabupaten Sukamara mencapai 86,09 juta rupiah. Angka ini diperoleh menggunakan data Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020– 2023 (Pertengahan tahun/Juni). Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara tahun 2019– 2023 sebesar 6,06 persen (2019), 1,98 persen (2020), 4,74 persen (2021), 5,62 persen (2022), dan 5,64 persen (2023). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 terutama didukung oleh

pertumbuhan pada kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 6,37 persen.

**Sasaran 6: Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah**

Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun keempat RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023, dapat dilihat pada 6 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2023 Target Akhir Tahun RPJMD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB)	1.513.308,7	1.639.577,2	108,34	1.590.346,7	1.814.467,2	114,09 %	1.590.346,7
2	Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB)	144.363	162.577,4	112,62	151.712	170.746,5	112,55 %	151.712
3	Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB	59		0	62	100,90	162,74 %	62
4	Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB)	27,14		0	27,14	21,71	79,99%	27,14
5	Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 149.700.000,00	Rp. 118.873.938.885	79,41	Rp. 714.328.774.198	Rp. 351.335.155.152	49,18%	Rp. 5.972.680.472.295
6	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	94,7	82,58	87,20	100	93,10	93,10%	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		78,05%			101,94%			

Capaian kinerja indikator 1 “Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB)” adalah sebesar 1.814.467,2 dari target sebesar 1.590.346,70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 114,09 %, capaian ini lebih dari target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 1 tahun ini adalah sebesar 114,09%, bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 mengalami kenaikan, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 114,09%.

Capaian kinerja indikator 2 “Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB)” adalah sebesar 170.746,5 dari target sebesar 151.712 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 112,55 %, capaian ini lebih dari target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 2 tahun ini adalah sebesar 112,55%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara

maka capaian kinerjanya mencapai 112,55%.

Capaian kinerja indikator 3 “Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB” adalah sebesar 100,90 juta dari target sebesar 62 juta yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 162,74%, capaian ini lebih dari target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 3 tahun ini adalah sebesar 162,74%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 162,74%.

Capaian kinerja indikator 4 “Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (ADHB)” adalah sebesar 21.71 dari target sebesar 27,14 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 79,99%, capaian ini tidak sesuai dari target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 4 tahun ini adalah sebesar 79,99%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 79,99%.

Capaian kinerja indikator 5 “Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)” adalah sebesar Rp. 351.335.155.152 dari target sebesar Rp. 714.328.774.198 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 49,18 capaian ini tidak sesuai dari target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 5 tahun ini adalah sebesar 49,18 %, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 5,89 %.

Capaian kinerja indikator 6 “Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)” adalah sebesar 93,10 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 93,10% capaian ini tidak sesuai dari target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 6 tahun ini adalah sebesar 93,10 %, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 93,10%.

#### Sasaran 7: Meningkatnya kualitas hidup yang lestari

Meningkatnya kualitas hidup yang lestari. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2022 sebagai tahun keempat RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023, dapat dilihat pada 2 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023 Target Akhir Tahun RPJMD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1	Hasil pengukuran indeks kualitas air	< 10	2,50	100	< 10	<5	100.00 %	< 10
2	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	100	46,83	46,83	100	47.85	47.85%	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		73,42%			73,93%			

Capaian kinerja indikator 1 “Hasil pengukuran indeks kualitas air” adalah sebesar <5 dari target sebesar <10 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.

Capaian kinerja indikator 2 “Hasil Pengukuran indeks kualitas tutupan lahan” adalah sebesar 47,85 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 47,85 %, capaian ini kurang dari target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 2 tahun ini adalah sebesar 47,85%, bila dibandingkan dengan target Tahun 2023 tidak mengalami penurunan, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 47,85 %.

**Sasaran 8 : Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan**

Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun keempat RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023, dapat dilihat pada 3 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2023 Target Akhir Tahun RPJMD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1	Persentase laporan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	70	100	142,86	85	87.69	103.16 %	85
2	Persentase laporan pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	70	100	142,86	85	86.02	101.20 %	85
3	Indeks Pembangunan Gender	92,53	91,87	99,29	93.1	N/A	0.00%	93,10
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		128,33%			68,12%			

Capaian kinerja indikator 1 “Persentase laporan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti” adalah sebesar 87,69 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,16 %, capaian ini melebihi dari target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 1 tahun ini adalah sebesar 103,16 %, bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 mengalami penurunan, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 103,16 %.

Capaian kinerja indikator 2 “Persentase laporan pelanggaran perda yang ditindaklanjuti” adalah sebesar 86,02 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,20 %, capaian ini melebihi dari target yang diperjanjikan.

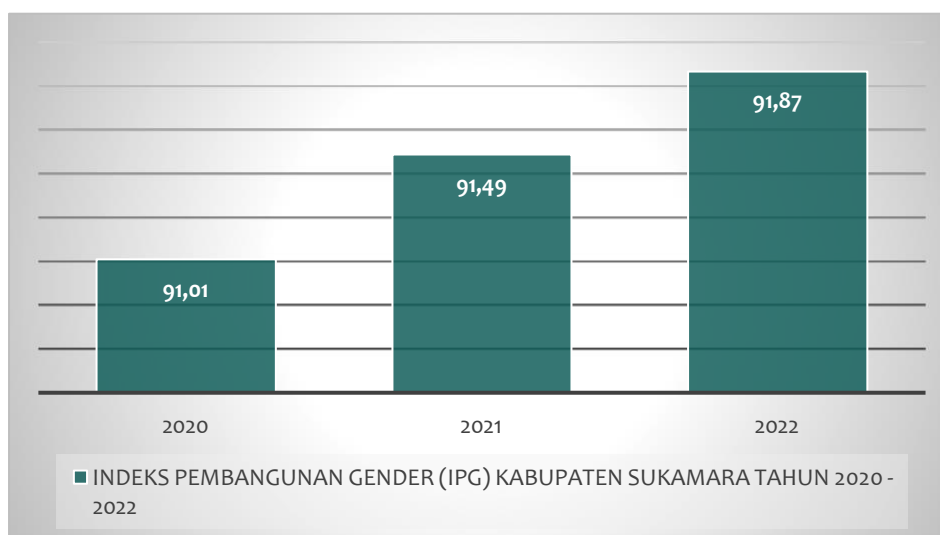
Tahun 2023 adalah tahun ke 5 RPJMD, capaian kinerja indikator 2 tahun ini adalah sebesar 101,20 %, bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 mengalami penurunan, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sukamara maka capaian kinerjanya mencapai 101,20 %.

Capaian kinerja indikator 3 “Indeks Pembangunan Gender” belum dapat di simpulkan karena data dari BPS belum tersedia untuk tahun 2023.

1. Persentase laporan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti  
Analisi penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif yang telah dilakukan :
  - Pada indikator Kinerja Utama persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum capaian cukup berhasil dikarenakan pada tahun 2022 patroli rutin dilakukan
2. Persentase laporan pelanggaran perda yang ditindaklanjuti  
Laporan pelanggaran Perda dan Perkada baik dilaporkan oleh masyarakat ataupun tertangkap tangan langsung oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 adalah :
  - Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukamara sebanyak 5 kali
  - Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2017 tentang penataan dan penempatan pedagang pada pasar di Kabupaten Sukamara sebanyak 2 kali
  - Peraturan Bupati Sukamara nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi kebiasaan baru pola kondisi Pandemi Corona Virus Disease 19 sebanyak 6 kali
  - Peraturan Bupati Sukamara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penertiban hewan peliharaan sebanyak 4 kali

Total dari kegiatan tersebut sebanyak 17 kali
3. Indeks pembangunan gender (IPG)  
IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

**Rumusan IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki**



**\*Data IPG tahun 2023 belum tersedia**



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 ini, merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategik Pembangunan Daerah/RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018– 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan masyarakat Sukamara yang sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintahan yang profesional.

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 8 sasaran yang mencakup 33 indikator sasaran. Diketahui rata-rata capaian misi I **88,43 %** atau **Tinggi**, rata-rata misi II **99,18 %** atau **Sangat Tinggi**, rata-rata misi III **96,53 %** atau **Sangat Tinggi**, rata-rata misi IV **85,15 %** atau **Tinggi**, dan rata-rata misi V **68,12 %** atau **Sedang**. Rata-rata capaian kinerja seluruh misi yakni **87,48 %** atau **Tinggi**.

Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan kerjasama kepala perangkat daerah terkait, pegawainya, dan stake holder terkait untuk menjalankan kinerja didukung dengan alokasi anggaran yang sesuai pada dokumen perencanaan.

### 4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Keseluruhan capaian Kinerja tersebut di atas, baik yang sangat tinggi maupun yang masih sangat rendah, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2022, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Sukamara pada Tahun Anggaran 2022, yaitu sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan dan setiap tahunnya memilah program prioritas untuk di kerjakan yang berimplikasi pada alokasi anggaran yang prioritas sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi;
2. Dalam Pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan agar lebih berfokus pada pencapaian hasil dengan menetapkan hubungan yang logis dan matematis antara input dan output suatu kegiatan, bukan hanya semata berorientasi pada terlaksananya / selesainya kegiatan saja. Membagi capaian kinerja pertahun agar trem grafik bisa stabil dan terus meningkat;
3. Melaksanakan dan memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program seluruh unit kerja dengan pihak – pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektifitas dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan disesuaikan kembali pada dokumen perencanaan;
4. Terus meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas aparatur daerah Kabupaten Sukamara baik dari segi teknis maupun manajerial sehingga dapat menunjang



terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedepan, diharapkan sekali untuk :

1. Melakukan revidi terhadap dokumen perencanaan, baik dari sisi substansi sasaran dan indikator kinerjanya per triwulan/semester ataupun pertahun;
2. Merencanakan perbaikan dokumen pendukung dokumen perencanaan seperti rencana aksi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan beserta SOP, evaluasi rencana aksi, dsb;
3. Merencanakan formulasi pengukuran kinerja;
4. Merencanakan sistem pelaporan kinerja berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat;
5. Pemenuhan dokumen penunjang penilaian SAKIP yang konsisten setiap tahunnya untuk dipenuhi; dan
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah terkait indikator sasaran yang diampu;

## Lampiran 1: Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukamara 2018 - 2023

### INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 PERUBAHAN RPJMD 2018 - 2023

No	Indikator	Realisasi		Target Tahun			Rumus Indikator	Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,95	68,03	68,62	69,21	69,81	$IPM = 1/3 (X_1 + X_2 + X_3)$ <p><b>Keterangan:</b>  <math>X_1</math> = Indeks Harapan Hidup  <math>X_2</math> = Indeks Pendidikan  <math>X_3</math> = Indeks Standar Hidup Layak</p> <p><b>Dimana:</b>  <math>X_2 = 2/3 [(Indeks Melek Huruf] + 1/3 [(Indeks Rata-rata Lama Sekolah]</math></p>	BPS, DIKPORA, KESEHATAN,
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53,00	54,00	54,5	55	55,5	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).</p> <p>A. Indeks Kualitas Air (IKA) :</p> $Nilai\ relatif = \frac{P_i}{P_j}$ <p>Rumus metode TP:</p> $IP = \frac{\sqrt{(C_1 - C_2)^2 + (C_3 - C_4)^2}}{\sqrt{(C_1 - C_2)^2 + (C_3 - C_4)^2}}$ <p> <math>0 \leq P_i \leq 1,0 \rightarrow</math> baik (memenuhi baku mutu)  <math>1,0 &lt; P_i \leq 5,0 \rightarrow</math> cukup bagus  <math>5,0 &lt; P_i \leq 10,0 \rightarrow</math> cukup sedang  <math>P_i &gt; 10,0 \rightarrow</math> cukup buruk </p> <p>B. Indeks Kualitas Udara (IKU)</p> $IKU = 100 - [50 / 0,9 \times (I_{leu} - 0,1)]$	DLH

No	Indikator	Realisasi		Target Tahun			Rumus Indikator	Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023		
							<p>C. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)</p> $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana:  IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan  TH = Tutupan Hutan </p>	
3	Pertumbuhan ekonomi	6,05	1,98	2,4	4,13	4,8	<p>Rumus Pertumbuhan Ekonomi:</p> $G_t = \frac{PDR_t - PDR_{t-1}}{PDR_{t-1}} \times 100\%$ <p><b>Keterangan:</b>  <math>G_t</math> = pertumbuhan ekonomi periode t (dimaksudkan atau tahunan)  <math>PDR_t</math> = produk domestik bruto periode t berdasarkan harga konstan  <math>PDR_{t-1}</math> = PDR satu periode sebelumnya </p>	BPS
4	Angka Kemiskinan	3,36	3,36	3,36	3,2	3,2	$P_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{y_i - y_q}{x - y_q} \right]^2$ <p><b>Dimana:</b>  <math>P_k</math> = Persentase penduduk miskin (<i>head count index</i>)  <math>n</math> = Garis kemiskinan  <math>y_i</math> = Rata-rata pengeluaran perkapita seluruh penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (<math>i = 1, 2, 3, \dots, q</math>); <math>y_i \leq x</math>  <math>q</math> = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan  <math>x</math> = Jumlah penduduk </p>	BPS
5	PDRB Per Kapita	65,18	66,27	70,27	74,52	79,02	$\frac{PDRB}{Penduduk\ Pertengahan\ tahun}$	BPS
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,57	3,13	2,72	2,33	1,98	<p>Angkatan Kerja = Jumlah orang yang bekerja + Jumlah orang yang tidak bekerja</p> $\frac{Jumlah\ Pengangguran}{Angkatan\ Kerja} \times 100\%$	BPS

No	Indikator	Realisasi		Target Tahun			Rumus Indikator	Penanggung Jawab																																
		2019	2020	2021	2022	2023																																		
7	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	45	45	50	55	60	<table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Nilai Angka</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>&gt;90-100</td><td>Intimewa</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>&gt;80-90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>3</td><td>BH</td><td>&gt;70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>&gt;60-70</td><td>Baik, perlu sedikit perbaikan</td></tr><tr><td>5</td><td>CC</td><td>&gt;50-60</td><td>Cukup memuaskan, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar</td></tr><tr><td>6</td><td>C</td><td>&gt;30-50</td><td>Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar</td></tr><tr><td>7</td><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan &amp; perubahan yang sangat mendasar</td></tr></table>	No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1	AA	>90-100	Intimewa	2	A	>80-90	Memuaskan	3	BH	>70-80	Sangat Baik	4	B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan	5	CC	>50-60	Cukup memuaskan, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar	7	D	0-30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar	Organisasi
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																																					
1	AA	>90-100	Intimewa																																					
2	A	>80-90	Memuaskan																																					
3	BH	>70-80	Sangat Baik																																					
4	B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan																																					
5	CC	>50-60	Cukup memuaskan, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar																																					
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar																																					
7	D	0-30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar																																					
8	Indeks Gini	0,33	0,3	0,298 25	0,2965	0,29475	<div><math display="block">G = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(Q_i + Q_{i+1})</math><p>dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau penghasilan sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G &lt; 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 &lt; G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G &gt; 0,5 = ketimpangan tinggi</p></div>	BPS																																

Sukamara, Maret 2022

Bupati Sukamara,  
  
 H. WINDU SUBAGIO

## Lampiran 2 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

### Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1 : Membangun Manajemen Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, dan Demokratis Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat						
1	Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintah yang baik	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai Pelaksanaan reformasi birokrasi meningkatnya dari 45 menjadi tahun 60 diakhir periode	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	WTP
					Nilai LkjIP	BB(>70)
					Indeks Kepuasan Masyarakat	95 (Nilai)
					Tingkat Maturiti SPIP	Terdefinisi
					Nilai EKPPD	Sangat Tinggi (minimal 4,21)
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Masyarakat yang terdidik dan Sehat						
2	Mewujudkan masyarakat sukamara yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 67,52 menjadi 69,81 diakhir RPJMD	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Harapan Lama Sekolah	12,95
					Rata-rata Lama Sekolah	8,64
					Angka Harapan Hidup	71,6
					Presentase Balita Gizi Buruk	≤1
					Konsumsi per kapita	9137
Misi 3 : Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur Dan Berkeadilan						
	Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Gini Ratio	Gini ratio menurun dari 0,357 menjadi 0,2947 di akhir periode	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	55
					Persentase penduduk berakses air minum	35
					Rasio jaringan irigasi	95

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4	5	6	7
					Cakupan layanan Telekomunikasi	100
					Persentase rumah tinggal bersanitasi	77,80
					Persentase rumah tangga pengguna listrik	99,50
				Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	30
Misi 4 : Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri, Dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup						
	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi bertahan di 4,18 pada akhir periode	Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	1,98
					Tingkat partisipasi kerja	65,94
					Angka kemiskinan	2,79
					Tingkat inflasi	4
					PDRB Per Kapita ADHB	79,02
				Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB)	1.590.346,7
					Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB)	151.712
					Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB	62

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4	5	6	7
					Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB)	27,14
					Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PM A)	714.328.774.198
					Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	100
	Meningkatkan kualitas pendayagunaan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan		Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Hasil pengukuran indeks kualitas air	< 10
					Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	100
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat Munuju Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram Dan Dinamis						
	Mewujudkan masyarakat sukamara yang aman, tertib dan dinamis		Berkurangny a kasus tindakan konflik sosial, radikalisme (kriminal)	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembanguna n	Persentase laporan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang ditindaklanj uti	85
					Persentase laporan pelanggaran perda yang ditindaklanj uti	85
					Indeks Pembanguna n Gender	93,10

## Lampiran 3 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



### BUPATI SUKAMARA

#### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. KASPINOR, S.E., M.Si.

Jabatan : Pj. BUPATI SUKAMARA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sukamara, Oktober 2023

**Pj. BUPATI SUKAMARA**

**DR. H. KASPINOR, S.E., M.Si.**

## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN SUKAMARA

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Misi 1 Membangun Manajemen Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, dan Demokratis Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat					
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pelayanan public	1.1	Opini BPK	Opini	WTP
		1.2	Nilai LkjIP	Nilai	BB (>70)
		1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	95
		1.4	Tingkat Maturiti SPIP	Kategori	Terdefinisi
		1.5	Nilai EKPPD	Nilai	Sangat Tinggi (minimal 4,21)
Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Masyarakat yang Terdidik dan Sehat					
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan	2.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,95
		2.2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,64
		2.3	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,6
		2.4	Presentase Balita Gizi Buruk	%	≤ 1
		2.5	Konsumsi per kapita	ribuan/ kapita/tahun	9137
Misi 3 Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur Dan Berkeadilan					
3	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	3.1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	55
		3.2	Persentase penduduk berakses air minum	%	35
		3.3	Rasio jaringan irigasi	%	95
		3.4	Cakupan layanan Telekomunikasi	%	100
		3.5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	77,80



NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		3.6	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	99,50
4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	4.1	Rasio rumah layak huni (jumlah rumah)	Unit	30
<b>Misi 4 Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri, Dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup</b>					
5	Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	5.1	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,98
		5.2	Tingkat partisipasi kerja	%	65,94
		5.3	Angka kemiskinan		2,79
		5.4	Tingkat inflasi	%	4
		5.5	PDRB Per Kapita ADHB	(Juta rupiah/tahun)	79,02
6	Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	6.1	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB)	(Juta/tahun)	1.590.346,7
		6.2	Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB)	(Juta/tahun)	151.712
		6.3	Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB	(Juta/tahun)	62
		6.4	Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB)	%	27,14
		6.5	Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	Rp. 714.328.774.198
		6.6	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	%	100
7	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	7.1	Hasil pengukuran indeks kualitas air	%	< 10
		7.2	Hasil pengukuran indeks	%	100

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
			kualitas tutupan lahan		
<b>Misi 5 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram Dan Dinamis</b>					
8	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	8.1	Persentase laporan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	%	85
		8.2	Persentase laporan pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	%	85
		8.3	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,10

Sukamara, Oktober 2023

**Pj. BUPATI SUKAMARA**



**DR. H. KASPINOR, S.E., M.Si.**

**PROGRAM DAN ANGGARAN  
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KABUPATEN SUKAMARA**

No	Sasaran strategis	No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	PD
<b>Misi 1 Membangun Manajemen Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, dan Demokratis Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat</b>						
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pelayanan publik	1.1	Opini BPK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 103.473.641.096	BPKAD
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.990.025.185	BPKAD
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.917.663.700	BPKAD
				Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp. 248.610.000	Inspektorat Daerah
		1.2	Nilai LkjIP	Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 82.665.000	Bag. Organisasi
				Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan	Rp. 888.335.000,00	Inspektorat Daerah

No	Sasaran strategis	No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	PD
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.115.722.450	Bappeda
		1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Rp. 90.940.000	Bag. Organisasi
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 9.437.150,-	Kec. Pantai Lunci
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 0	Kec. Jelai
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 11.776.000	Kec. Permata Kecubung
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 108.134.000	Kec. Sukamara
				Program pelayanan Penanaman modal	Rp. 72.225.000	PMPPTSP

No	Sasaran strategis	No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	PD
				Program Aplikasi Informatika	Rp. 1.716.349.136	Diskominfo Sukamara
				Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 40.215.500	Disdukcapil
				Program Pencatatan Sipil	Rp. 83.900.000	Disdukcapil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 119.471.000	Disdukcapil
				Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.616.831.979	BKPSDM
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 1.003.369.000	BKPSDM
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 6.477.260.385	Sekretariat DPRD
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 857.331.048	Dinsos PMD
		1.4	Tingkat Maturiti SPIP	Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	Rp. 737.755.000	Inspektorat Daerah
		1.5	Nilai EKPPD	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Rp. 512.859.400	Bag. Pem
<b>Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara yang Terdidik dan Sehat</b>						



No	Sasaran strategis	No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	PD
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan	2.1	Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 52.814.775.906	Dikbud
		2.2	Rata-rata Lama Sekolah	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 124.368.745	Disperpusin
				Program Pengelolaan Arsip	Rp. 62.830.610	Disperpusin
				2.3	Angka Harapan Hidup	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		2.4	Presentase Balita Gizi Buruk	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Manusia Kesehatan	Rp. 2.481.514.475	Dinkes
				Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	Rp. 938.483.500	Dinas Kesehatan
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 2.264.661.750	Porapar
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 10.727.984.723	Porapar
				2.5	Konsumsi per kapita	-
		Misi 3 Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur Dan Berkeadilan				
3	Meningkatnya kualitas	3.1	Persentase jalan	Program penyelenggaraan	Rp. 46.428.167.410	PUPRPRKP

No	Sasaran strategis	No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	PD
	pembangunan infrastruktur layanan dasar		kabupaten dalam kondisi baik	jalan		
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 1.193.602.536	Dinas Perhubungan
		3.2	Persentase penduduk berakses air minum	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Rp. 1.607.660.000	PUPRPRKP
		3.3	Rasio jaringan irigasi	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Rp. 9.992.709.237	PUPRPRKP
		3.4	Cakupan layanan telekomunikasi	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1.161.546.000	Diskominfosa ndi
		3.5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 926.390.994	DPUPRPRKP
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase	Rp. 5.650.721.000	DPUPRPRKP
				Program Pengembangan Permukiman	Rp. 5.584.034.006	DPUPRPRKP
				Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 11.312.440.060	DPUPRPRKP
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 11.544.214.884	DPUPRPRKP
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 584.999.330	DPUPRPRKP

No	Sasaran strategis	No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	PD
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.201.577.970	DPUPRPRKP
		3.6	Persentase rumah tangga pengguna listrik	-	-	-
4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	4.1	Rasio rumah layak huni	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 889.055.000	DPUPRPRKP
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 934.230.000	PUPRPRKP
<b>Misi 4 Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri, Dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup</b>						
5	Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	5.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	-	BPS
		5.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Rp. 74.498.905	Dinas Nakertrans
				Program penempatan tenaga kerja	Rp. 226.354.509	Dinas Nakertrans
				Program Hubungan Industrial	Rp. 146.927.000	Dinas Nakertrans
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 135.863.000	Kecamatan Balai Riam
				Program Pemberdayaan	Rp. 103.571.950	Kecamatan



No	Sasaran strategis	No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	PD
				Masyarakat Desa dan Kelurahan		Pantai Lunci
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 291.905.900	Kecamatan Jelai
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 144.268.500	Kecamatan Permata Kecubung
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 975.326.850	Kecamatan Sukamara
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 316.370.000	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
				Program Pengembangan UMKM	Rp. 1.768.304.145	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 70.180.075	Porapar
		5.3	Angka kemiskinan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 927.331.056	Dinsos PMD
				Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 50.000.000	Dinsos PMD
				Program	Rp. 1.490.590.000	Dinsos PMD

No	Sasaran strategis	No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	PD
				Rehabilitasi Sosial		
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 1.636.710.000	Dinsos PMD
		5.4	Tingkat Inflasi		Rp. 0	BPS
		5.5	PDRB per kapita ADHB	-	-	BPS
6	Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	6.1	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB)	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rp. 12.834.829.660	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Rp. 3.304.462.130	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 199.158.260	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 123.857.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 3.679.840.679	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		6.2	Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB	Program pengelolaan perikanan tangkap	Rp. 4.377.194.613	Dinas Perikanan
				Program pengelolaan perikanan budidaya	Rp. 3.269.598.433	Dinas Perikanan

No	Sasaran strategis	No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	PD
				Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Rp. 2.865.201.662	Dinas Perikanan
		6.3	Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rp. 2.846.410.000	Porapar
				Program pemasaran pariwisata	Rp. 643.673.140	Porapar
		6.4	Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 685.289.371	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 1.191.696.060	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
				Program perencanaan dan pembangunan industry	Rp. 106.780.000	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
		6.5	Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 72.225.000	Dpmptsp
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 8.175.000	Dpmptsp
				Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 37.800.000	DPMPTSP
				Program Pengendalian Pelaksanaan	Rp. 480.000.000	DPMPTSP

No	Sasaran strategis	No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	PD
				Penanaman Modal		
		6.6	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Rp. 6.254.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rp. 597.783.786	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 38.909.020	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program pengawasan keamanan pangan	Rp. 27.535.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	7.1	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Rp. 117.192.738	Dinas Lingkungan Hidup
			Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Rp. 219.655.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 25.700.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum	Rp. 18.045.000	Dinas Lingkungan



No	Sasaran strategis	No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	PD
				Adat (mha), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 26.380.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program pengelolaan Persampahan	Rp. 1.372.317.100	Dinas Lingkungan Hidup
				Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Rp. 225.400.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Penyelesaian sengketa Tanah Garapan	Rp. 341.000.400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp. 168.485.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>Misi 5 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram Dan Dinamis</b>						

No	Sasaran strategis	No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	PD
8	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	8.1	Persentase Laporan pelanggaran ketentraman an ketertiban yang ditindaklanjuti	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 3.283.225.280	BPBD
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 457.493.143	PP dan Damkar
				Program Penanganan Bencana	Rp. 481.856.488	Dinsos PMD
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 0	Kecamatan Balai Riam
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 0	Kecamatan Pantai Lunci
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 0	Kecamatan Jelai
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 14.026.000	Kecamatan Permata Kecubung
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 0	Kecamatan Sukamara
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya	Rp. 308.204.000	Badan Kesbangpol
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan	Rp. 629.053.368	Badan Kesbangpol

No	Sasaran strategis	No	Indikator kinerja	Program	Anggaran	PD
				Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
		8.2	Persentase laporan pelanggaran perdata yang ditindaklanjuti	Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 403.666.318	Satpol PP, Damkar, BPBD
		8.3	Indeks Pembangunan Gender	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 430.415.500	DP3APPKB
				Program perlindungan Perempuan	Rp. 93.475.000	DP3APPKB
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 95.556.000	DP3APPKB
Total					Rp. 376.740.542.305	

Sukamara, Oktober 2023

**Pj. BUPATI SUKAMARA**



**Dr. H. KASPINOR, SE., M.Si**



## Lampiran 4 : Pengukuran Kinerja

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 1 : Membangun Manajemen Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, dan Demokratis Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat							
1	Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintah yang baik	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai Pelaksanaan reformasi birokrasi meningkatnya dari 45 menjadi tahun 60 diakhir periode	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	WTP	*WTP
					Nilai LkjIP	BB (>70)	*B (>60,85)
					Indeks Kepuasan Masyarakat	95 (Nilai)	90,41
					Tingkat Maturiti SPIP	Terdefinisi	terdefinisi
					Nilai EKPPD	Sangat Tinggi (minimal 4,21)	Rendah (2,58)
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Masyarakat yang terdidik dan sehat							
2	Mewujudkan masyarakat sukamara yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 67,52 menjadi 69,81 diakhir RPJMD	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Harapan Lama Sekolah	12,95	12,16
					Rata-rata Lama Sekolah	8,64	8,17
					Angka Harapan Hidup	71,6	74,12
					Presentase Balita Gizi Buruk	≤1	0,45
					Konsumsi per kapita	9137	9494
Misi 3 : Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur Dan Berkeadilan							





No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Gini Ratio	Gini ratio menurun dari 0,357 menjadi 0,2947 di akhir periode	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	55	35,34
					Persentase penduduk berakses air minum	35	32,32
					Rasio jaringan irigasi	95	42,11
					Cakupan layanan Telekomunikasi	100	94,00
					Persentase rumah tinggal Bersanitasi	77,8	18,26
					Persentase rumah tangga pengguna listrik	99,5	N/A
			Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	30	42	
Misi 4 : Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri, Dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup							
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi bertahan di 4,18 pada akhir periode	Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	1,98	5,23	
				Tingkat partisipasi kerja	65,94	72,39	
				Angka kemiskinan	2,79	3,96	
				Tingkat inflasi	4	5,64	
				PDRB Per Kapita ADHB	79,02	86,09	
			Meningkatnya peran sektor	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB)	1.590.346,70	1.814.467,2	



No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
				pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB)	151.712	170.746,5
					Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB	62	100,90
					Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB)	27,14	21,71
					Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	714.328.774.198	351.335.155.152
					Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	100	93,10
	Meningkatkan kualitas pendayagunaan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan		Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Hasil pengukuran indeks kualitas air	< 10	<5
					Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	100	47,85
<b>Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram Dan Dinamis</b>							
	Mewujudkan masyarakat sukamara yang aman, tertib dan dinamis		Berkurangnya kasus tindakan konflik sosial, radikalisme (kriminal)	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Persentase laporan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang Ditindaklanjuti	85	87,69



No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase laporan pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	85	86,02
					Indeks Pembangunan Gender	93,1	N/A



## Lampiran 5 : Capaian Kinerja 2018 - 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Misi 1 : Membangun Manajemen Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, dan Demokratis Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat											
1	Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintah yang baik	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai Pelaksanaan reformasi birokrasi meningkatnya dari 45 menjadi tahun 60 diakhir periode	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	*WTP
					Nilai LkjIP	54,72/CC	55,60/C C	58,60/C C	B (>60,05)	B (>60,85)	* B (>60,85)
					Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	89,3	90	91,98	83,13	90,41
					Tingkat Maturiti SPIP	terdefinisi	terdefinisi i	terdefinisi i	terdefinisi i	terdefi nisi	terdefinisi
					Nilai EKPPD	2,28073/Ting gi	2,28073/ Tinggi	2,85/Tin ggi	NA	Rendah (2,58)	*Rendah (2,58)
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Masyarakat yang terdidik dan sehat											
2	Mewujudkan masyarakat sukamara yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 67,52 menjadi 69,81 diakhir RPJMD	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Harapan Lama Sekolah	12,10	12,11	12,12	12,13	12,15	12,16
					Rata-rata Lama Sekolah	7,84	7,91	8,01	8,09	8,10	8,17
					Angka Harapan Hidup	71,46	71,49	71,53	71,56	71,80	74,12



No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Presentase Balita Gizi Buruk	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	0,5	0,56	0,45
					Konsumsi per kapita	8482	8738	8674	8773	9.225	9494
<b>Misi 3 : Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur Dan Berkeadilan</b>											
	Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur dasar untuk kesejahteraan masyarakat	<b>Gini Ratio</b>	Gini ratio menurun dari 0,357 menjadi 0,2947 di akhir periode	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	17,77%	30,17%	36,37%	33,55	34,78	35,34
					Persentase penduduk berakses air minum	33,2	33,2	-	18,38	19,92	32,32
					Rasio jaringan irigasi	-	64,91%	72,05	37,11	63,77	42,11
					Cakupan layanan Telekomunikasi	88%	88%	91%	N/a	90,60	94,00
					Persentase rumah tinggal bersanitasi	N/a	N/a	N/a	TAD	TAD	18,26
					Persentase rumah tangga pengguna Listrik	98,75	97,45	98,34	TAD	95,41	N/A



No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	207	30	30	0	155	42
<b>Misi 4 : Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri, Dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup</b>											
	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi bertahan di 4,18 pada akhir periode	Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	3,13	3,57	3,13	4,65	6,46	5,23
					Tingkat partisipasi kerja	74,18	73,37	65,60	71,82	69,82	72,39
					Angka kemiskinan	3,19	3,16	3,23	3,66	3,72	3,96
					Tingkat inflasi	6,02	2,02	1,62	4,74	5,62	5,64
					PDRB Per Kapita ADHB	62,47	65,18	66,27	76,10	81,70	86,09
				Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB)	1.189.064,7	1.274.424,1	1.417.944,9	1.459.152,4	1.639.577,2	1.814.467,2
					Kontribusi sektor	112.286	125.534	132.225	146.904,60	162.577,4	170.746,5



No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				perekonomian daerah	perikanan dalam PDRB (ADHB)						
					Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB	47	52	52	0	0	100,90
					Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB)	27,14	27,14	27,14	0	21,91	21,71
					Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 2.879.273.378.498	Rp. 849.382.600.658	Rp. 201.465.345.151	0	Rp. 118.873.938.885	Rp.351.335.155.152
					Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	84,2	86,8	89,5	0	82,58	93,10
	Meningkatkan kualitas pendayagunaan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan		Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Hasil pengukuran indeks kualitas air	< 5	< 10	< 5	0	2,50	<5
					Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	100	100	100	46,60	46,83	47,85
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat Munuju Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram Dan Dinamis											



No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Mewujudkan masyarakat sukamara yang aman, tertib dan dinamis		Berkurangnya kasus tindakan konflik sosial, radikalisme (kriminal)	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Persentase laporan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	TAD	0	0	0	100,00	87,69
					Persentase laporan pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	TAD	0	0	0	100,00	86,02
					Indeks Pembangunan Gender	91,45	90,84	91,40	91,49	91,87	N/A

\*Nilai 2022





## Lampiran 6 : Rencana Aksi Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara

### RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA LKIP TAHUN ANGGARAN 2022																										
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET								PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TARGET INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB SETELAH PERUBAHAN	TARGET JADWAL KEGIATAN				REALISASI KEGIATAN				KETERANGAN
			RENCANA				REALISASI											TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas hasil Evaluasi LAKIP BPKD dan Daerah	50%	0%	10%	40%	50%	0%	10%	40%	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten	Peningkatan hasil Evaluasi LAKIP BPKD dan Daerah	Meningkatnya nilai SAKIP Kabupaten B-r6	Rp. 106.240.000	Pembuatan Tim LKIP Kabupaten	Kabag Organisasi, Kasubag Tatakelola, Kasubag Kinerja dan RB									
																Rapat Rutin hasil LKIP Tahun Sebelumnya	Kabag Organisasi, Kasubag Tatakelola, Kasubag Kinerja dan RB, Inspektur dan Kepala BAPPEDA, Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan									
																Rapat Forum penyusunan LKIP	Kabag Organisasi, Kasubag Tatakelola, Kasubag Kinerja dan RB, Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan									
																Perencanaan Data LKIP PD dan Perjanj PD	Kasubag Tatakelola, Kasubag Kinerja dan RB, Analis Tatakelola									
																Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Perjanj Tahun 2019 Beserta Upload pada Sistem	Kasubag Tatakelola, Kasubag Kinerja dan RB, Analis Tatakelola									
																Perencanaan Data Kinerja PD	Kasubag Tatakelola, Kasubag Kinerja dan RB, Analis Tatakelola									
																Rapat Percepatan Evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB	Kabag Organisasi, Kasubag Tatakelola, Kasubag Kinerja dan RB, Analis Tatakelola									
																Perencanaan Data PD Sampai Untuk Evaluasi SAKIP	Kasubag Tatakelola, Kasubag Kinerja dan RB, Analis Tatakelola									
																Rapat Evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB	Kabag Organisasi, Kasubag Tatakelola, Kasubag Kinerja dan RB, Inspektur dan Kepala BAPPEDA, Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan Sampling									
																Sosialisasi Terkait Peningkatan SAKIP	Kabag Organisasi, Kasubag Tatakelola, Kasubag Kinerja dan RB, Inspektur, dan Kepala BAPPEDA, Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan									



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET								PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TARGET INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB SETELAH PERUBAHAN	TARGET JADWAL KEGIATAN				REALISASI KEGIATAN				KETERANGAN	
			RENCANA				REALISASI											TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																	
															Rapat Koordinasi Pemantauan SAPJ Tahun 2022	Kabag Organisasi, Kasubag Tatakelola, Kasubag Kinerja dan RB, Inspektur, dan Kepala SAPPEDA, Kasubag Pemasaran, Kasubag, dan Pelaporan											
															Rapat Koordinasi Pengujian Kinerja Perangkat Eselon II, III, IV Tahun 2022	Kabag Organisasi, Kasubag Tatakelola, Kasubag Kinerja dan RB, Inspektur, dan Kepala SAPPEDA, Kasubag Pemasaran, Kasubag, dan Pelaporan											

Sukamara, 03 Januari 2022  
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara

**RENDY LESMANA, S.P., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740524 200312 1 006



## Lampiran 7 : SOP MEKANISME PENGUMPULAN KINERJA

No	Aktivita	Pe ksana				Mutu Baku			Ket
		Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Analisis	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan PD	Kabag Organisasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan staf untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan PD					Dokumen	5	Dokumen format data	
2	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan PD					Dokumen	300	Dokumen format data	
3	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kabag Organisasi					Dokumen	300	Dokumen format data	
4	Menyampaikan, Mengumpulkan data dan informasi kinerja ke Kasubbag Tatalaksana					Berkas	900	Rekap dokumen kinerja	
5	Mengkompilasikan, Menganalisa, dan Mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja					Laporan	4500	Laporan kinerja triwulan	